

**KESEPADANAN PERNIKAHAN DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH
(Studi di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan)**

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**

**Oleh:
Chusnul Chotimah
NPM: 1974130017**



**HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**KESEPADANAN PERNIKAHAN DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH
(Studi di Desa Kasui Pasar Kabupaten Waykanan)**

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**



Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Pembimbing II : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.

**HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chusnul Chotimah
NPM : 1974130017
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis :Kesepadanan Pernikahan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan tesis berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 28 Maret 2021

Yang Menyatakan,

Chusnul Chotimah

ABSTRAK

Pernikahan sekufu bukanlah syarat terwujudnya keluarga sakinah. Namun, dengan adanya pernikahan sekufu dapat menyeimbangkan kondisi rumah tangga agar tercipta keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, masyarakat Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan memiliki tradisi kesepadanan pernikahan dalam hal profesi dan suku untuk mempermudah mereka dalam berkomunikasi dan melanjutkan usaha keluarga. Hal ini, dirasa oleh masyarakat tersebut menjadi faktor utama terciptanya keluarga sakinah. Permasalahan dalam tesis ini ialah *pertama*, Bagaimana praktik kesepadanan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan? *Kedua*, apa faktor-faktor penyebab munculnya tradisi kesepadanan pernikahan di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan? *Ketiga*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kesepadanan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan?

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Sumber data menggunakan sumber data primer yaitu dengan hasil wawancara 18 orang masyarakat Desa Kasui Pasar, kemudian didukung oleh data sekunder berupa buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Pengolahan data melalui *editing*, *coding*, *reconstructing*, dan sistematisasi data. Kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan metode berfikir induktif.

Kesepadanan pernikahan mencakup kesepadanan dalam profesi toko emas dan mempunyai suku Jawa Serang. Masyarakat mempercayai bahwa hal inilah yang menjadi faktor utama terwujudnya keluarga sakinah. Tujuannya agar lebih mudah untuk mencari tahu bibit keluarga masing-masing pihak serta dalam rangka mempererat tali persaudaraan antar sesama suku Jawa Serang. Dalam hal profesi, agar lebih mudah untuk melanjutkan usaha keluarga. Hal ini sejalan dengan *mas{lahah al-mursalah*, yaitu menjaga keturunan (*hifz{ al-nasab*), menjaga harta (*hifz{ al-ma>l*) serta memberikan kemaslahatan secara umum di masyarakat. Faktor penyebab munculnya tradisi ini ialah adanya kemudahan dalam berkomunikasi jika menikah dengan sesama suku, resiko menjual emas di pasar bagi seorang wanita, pernikahan berbeda profesi sering mengalami ketidakharmonisan, adanya amanat dari kakek buyut mereka khususnya bagi kalangan penjual emas di Desa Kasui Pasar untuk melanjutkan usaha dalam mencari nafkah. Dalam ajaran agama Islam, faktor agamalah yang menjadi titik berat dalam membina keluarga yang sakinah untuk mendapatkan derajat bahagia dalam berumah tangga. Kasus yang terjadi di Desa tersebut seolah membuat suatu klasifikasi seseorang berdasarkan profesi dan suku. Sedangkan dalam Islam, semua manusia derajatnya adalah sama. Prinsip memilih pasangan dalam Islam ialah ketekunan beragama dan akhlak yang luhur, bahwa kemegahan harta, nasab, kecantikan itu sebagai penyempurna. Merujuk pada kaidah '*urf*', bahwa tradisi tersebut sudah melekat pada masyarakat, diterima oleh khalayak ramai khususnya di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan, serta melihat filosofi dibuatnya tradisi tersebut untuk mencapai suatu kemaslahatan antara keduanya, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak adanya nash al-Qur'an maupun Hadis yang dilanggar.

PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP

Judul Tesis : Kesepadanan Pernikahan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan)

Nama Mahasiswa : Chusnul Chotimah

NPM : 1974130017

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Tertutup Tesis pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 19 Mei 2021

MENYETUJUI


Pembimbing I,


Dr. H. Jayusman, M.Ag.
NIP. 197411062000031002

Pembimbing II


Dr. Agus Hermanto, M.H.I.
NIP. —

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Dr. H. Iskandar Syukur, M.A.
NIP. 196603301992031002

PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : Kesepadanan Pernikahan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan)

Nama Mahasiswa : Chusnul Chotimah

NPM : 1974130017

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dilaksanakan sidang Ujian Tertutup Tesis pada tanggal 19 Mei 2021 dan disetujui untuk diujikan pada sidang Ujian Terbuka Tesis pada program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 04 Juni 2021

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Idham Khalid, M.Ag : (.....)

Penguji I : Dr. Muhammad Zaki, M.Ag : (.....)

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag : (.....)

Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I. : (.....)

Sekretaris : Eko Hidayat, S.Sos, M.H.I. : (.....)

Direktur Program Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung

Prof. Dr. H. Idham Khalid, M.Ag
NIP. 196010201988031005

PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : Kesepadanan Pernikahan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kasui Pasar, Kabupaten Way Kanan)

Nama Mahasiswa : Chusnul Chotimah

NPM : 1974130017

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dilaksanakan sidang Ujian Terbuka Tesis pada tanggal 29 Juni 2021 pada program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 29 Juni 2021

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Idham Khalid, M.Ag : (.....)

Penguji I : Dr. Muhammad Zaki, M.Ag : (.....)

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag : (.....)

Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I. : (.....)

Sekretaris : Eko Hidayat, S.Sos, M.H.I. : (.....)

Direktur Program Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung

Prof. Dr. H. Idham Khalid, M.Ag

NIP.196010201988031005

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)

ض	D{ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘ _	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fath{ah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>D{ammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
وُ	Fathah dan wau	Au	A dan U

3. Maddah

Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ... اِ...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	a>	a dan garis di atas
اِ...	<i>Kasrah dan ya</i>	i>	i dan garis di atas
اُ...	<i>D{ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

4. Ta> marbu>t{ah

Transliterasi untuk ta> marbu>t{ah ada dua, yaitu: ta> marbu>t{ah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta> marbu>t{ah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta> marbu>t{ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta> marbu>t{ahitu* ditransliterasikan dengan ha (h).

5. *Syaddah (Tasydi>d)*

Syaddah atau *tasydi>* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh: رَبَّنَا : *rabbana>*. Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh hirif syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'a>n*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fi> Z}ila>l al-Qur'a>n, Al-Sunnah qabl al-tadwi>n, Al-Iba>ra>t bi 'umu>m al-lafz} la> bi khus{u>s{ al-sabab*

9. *Lafz{ al-Jala>lah*

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud{a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l, Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>, Abu>> Nas}r al-Fara>bi.>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puja dan puji bagi Allah swt., shalawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad saw. keluarga, sahabat dan pengikutnya. Rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah swt. yang masih mencurahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga tesis dengan judul “Kesepadanan Pernikahan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan)” dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad saw., para sahabat dan para pengikutnya yang setia. Semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti.

Tesis ini disusun untuk melengkapi tugas memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam di Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Penulisan tesis ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Idham Khalid, M.Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung;
2. Bapak Dr. H. Iskandar Syukur, M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Agus Hermanto, M.H.I., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan tesis ini;
4. Seluruh Dosen dan Pegawai Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;
5. Guru dan Ustad yang telah ikhlas mengajarkan ilmu-ilmu Agama dan umum kepada saya agar menjadi pribadi yang baik.

6. Ayahandaku tersayang, (Sakri, M.Pd) Ibundaku tersayang, (Hasrubawati, S.Pd) Suamiku Tercinta (M.Rohim, M.Pd), Kakakku terayang (Hasrul Zikri), dan Adik-adikku (Hipda Tuhayat, dan Qonita Mutia) terimakasih atas do'a, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah *swt.* senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua;
7. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung dan juga Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
8. Sahabat-sahabatku tersayang (Hervianis Virdya Jaya, M.H, Inayatul Syarifah, M.H, Rita Sari, S.H, Hilmi Suryon Rofi'i, M.H, Ahmad Bayuki, S.H, dan Idrus Algifari, M.H,)
9. Seluruh rekan seperjuangan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung angkatan 2019 dalam menuntut ilmu serta untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. *Jazakumullah.*

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan dari keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi upaya penyempurnaan tulisan ini kedepannya.

Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (tesis) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman.

Bandar Lampung, 16 April 2021
Penulis,

Chusnul Chotimah
NPM. 1974130017

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
HALAMAN COVER JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
ABSTRAK.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	6
G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir.....	11
H. Pendekatan Penelitian.....	29
I. Metode Penelitian.....	29
 BAB II KONSEP KESEPADANAN DALAM HUKUM ISLAM	
A. Hukum Perkawinan di Indonesia.....	34
1. Pengertian Perkawinan.....	34
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	38
3. Tujuan Perkawinan.....	41
4. Prinsip-Prinsip Perkawinan.....	43
B. Kafa'ah dalam Perkawinan	49
1. Pengertian Kafa'ah.....	49
2. Dasar Hukum Kafa'ah.....	50
3. Tujuan Kafa'ah.....	55
4. Pendapat Ulama Tentang Kafa'ah dalam Perkawinan.....	57
5. Kriteria atau Batasan Menurut Ulama dan Undang-Undang	67
C. Keluarga Sakinah.....	68
1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	68
2. Syarat Terciptanya Keluarga Sakinah.....	70
3. Menciptakan Keluarga Sakinah.....	72
4. Membangun Keluarga Sakinah.....	77
 BAB III PRAKTIK KESEPADANAN PERNIKAHAN DI DESA KASUI PASAR KABUPATEN WAY KANAN	
A. Gambaran Umum Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan	
1. Sejarah Singkat Kecamatan Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan.....	81

2. Letak Geografis Kasui Pasar Kabupaten Waykanan Data monografi Kecamatan Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan.....	87
3. Data Demografi Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan.....	87
4. Data Monografi Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan.....	88
5. Data Responden.....	90
B. Praktik Kesepadanan Pernikahan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Masyarakat Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan.....	91

BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK KESEPADANAN DI DESA KASUI PASAR KABUPATEN WAY KANAN

A. Praktik Tradisi Kesepadanan Pernikahan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan.....	116
B. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Tradisi Kesepadanan Pernikahan di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan.....	124
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kesepadanan Pernikahan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan.....	128

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	139
B. Rekomendasi.....	140

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan menurut hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau *mis\aqan galiz{a* untuk mentaati perintah Allah *swt.*, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan menurut Islam bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Maksudnya ialah harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera agar terciptanya ketenangan lahir dan batin yang timbul karena terpenuhi keperluan hidupnya baik secara lahir maupun batin, sehingga terwujudnya kebahagiaan yakni kasih sayang antar sesama anggota keluarga.

Begitu pentingnya perkawinan dalam Islam, hingga Rasulullah *saw.*, mengharuskan setiap umatnya (yang sudah mampu) untuk menikah, sebagaimana sabdanya yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

Artinya: “Wahai kaum muda, barang siapa di antara kalian mampu menyipakan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barangsiapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng.” (Muttafaq ‘Alaih)²

Hadis tersebut dikuatkan dengan Firman Allah *swt.*, dalam QS. al-Nu>r ayat 32:

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Al-Shan’iny, *Subul al- Salam*, Juz 3, (Kairo: Da>r Ihya’ al-Turat{ al-Araby, 1379 H/ 1980 M), h. 109.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
 مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian³ diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”⁴ (QS. al- Nu>r ayat 32)

Pada ayat ini Allah swt., menyerukan kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian akhlak umat, agar masing-masing mereka mengawinkan laki-laki yang tidak beristeri, baik duda atau jejak dan perempuan yang tidak bersuami baik janda atau dara dengan membukakan kesempatan yang luas untuk itu. Demikian pula terhadap hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang sudah patut dikawinkan, hendaklah diberikan pula kesempatan yang serupa. Seruan ini berlaku untuk semua para wali (wali nikah) seperti bapak, paman dan saudara yang memikul tanggung jawab atas keselamatan keluarganya, berlaku pula untuk orang-orang yang memiliki hamba sahaya, janganlah mereka menghalangi anggota keluarga atau budak yang di bawah kekuasaan jika syarat untuk kawin telah terpenuhi, sehingga terbentuklah keluarga-keluarga yang sehat, bersih, dan terhormat.⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka seseorang yang akan menikah hendaklah teliti dalam memilih calon pasangan hidupnya yang sesuai dengan kriteria apa yang sudah diajarkan dalam syariat Islam. Seperti halnya dalam hadis tentang kriteria-kriteria dalam memilih calon pasangan hidup.

³ Maksudnya: Hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

⁴ Kementerian Agama RI, *al-Mubin (al-Qur'an dan Terjemahnya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 354.

⁵ Universitas Islam Indonesia, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid VI, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 626-627.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَا هِيَ، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ.⁶

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw., bersabda "Perempuan dikawini karena empat hal, karena hartanya, karena kedudukannya (martabatnya), karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah perempuan karena agamanya, maka kamu akan mendapat keberuntungan." (Muttafaq 'alaih bersama Imam tujuh)

Hadis di atas menjelaskan bahwa syari'at memberikan kriteria-kriteria dalam memilih calon pasangan hidup, yang mana dalam kriteria-kriteria tersebut diutamakan dalam urusan agamanya, karena agama bersifat kekal sedangkan kriteria-kriteria lainnya hanya bersifat sementara.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa:

"Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mis\aqan galiz{a}*) dan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."⁷

Salah satu cara untuk dapat mencapai tujuan perkawinan yang sakinah adalah dengan memilih pasangan yang serasi.⁸ *Sakinah* berasal dari kata *sakana* yang artinya menjadi tenang, mereda, hening, serat tinggal. Kata *sakinah* dalam Islam berarti mendatangkan ketenangan dan kedamaian secara khusus yaitu, perdamaian dari Allah *swt.*, yang berada di dalam kalbu. Rumah tangga yang sakinah adalah keluarga yang hidup dengan kasih sayang ketenangan dan kedamaian yang dibangun berdasarkan ajaran Islam serta mendapat rahmat Allah *swt.*⁹

Penentuan pasangan yang serasi tidak luput dari istilah kesepadanan. Dalam Islam istilah tersebut dikenal dengan sebutan *kafa'ah* atau *kufu'*.

⁶ al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Mara>m*, (Mekah: Da'r al-Ulu'm, 1478H), h. 201.

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

⁸ Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009), h. 15.

⁹ Ahsin W. Al-Hafiz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 263

Maksudnya ialah kesepadanan antara calon mempelai dalam tingkat akhlak, status sosial maupun kekayaannya.¹⁰ Aturan kesepadanan antar calon pengantin ini, sudah berkembang di tengah masyarakat, baik kesepadanan dalam hal agama, rupa, harta, keturunan, dan lain sebagainya.

Seperti yang terjadi di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan, di mana seorang perempuan yang bersuku Jawa Serang (Banten) dan bermata pencaharian toko emas harus menikah dengan seorang laki-laki yang bersuku Jawa Serang (Banten) serta bermata pencaharian toko emas juga. Sedangkan seorang laki-laki diberi keluasaan untuk memilih apakah menikah dengan seorang perempuan yang sama-sama suku Jawa Serang (Banten) dan bermata pencaharian toko emas atau tidak. Tujuan penentuan pasangan hidup berdasarkan kriteria tersebut bertujuan agar kelak rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah.

Berdasarkan penjelasan di atas, hal inilah yang mendorong penulis untuk melihat dan meneliti kasus tersebut dalam penelitian tesis yang berjudul “Kesepadanan Pernikahan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan)”.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Setiap masyarakat Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan yang bersuku Serang dan bermata pencaharian sebagai pengusaha emas harus menikah dengan orang yang sama-sama bersuku Serang dan berprofesi sebagai pengusaha emas.
- b. Dalam penerapan kesepadanan di Desa Kasui Kabupaten Pasar Way Kanan masih banyak kekeliruan yang hendaknya diluruskan khususnya terkait dengan pernikahan.

¹⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 34.

2. Batasan Masalah

Untuk mempermudah sebuah penelitian hingga tidak keluar dari pembahasan batasan masalah, maka penelitian ini hanya terbatas pada Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan mengenai kesepadanan pernikahan dalam membentuk keluarga sakinah, dengan meneliti masyarakat Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan yang usia pernikahannya sudah berjalan 2 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah terhadap penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kesepadanan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan?
2. Apa faktor-faktor penyebab munculnya tradisi kesepadanan pernikahan di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kesepadanan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik tradisi kesepadanan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab munculnya tradisi kesepadanan pernikahan di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik kesepadanan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharap dapat memberikan beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis, praktis, maupun manfaat akademis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup signifikan sebagai masukan pengetahuan dan literatur ilmiah hingga dapat dijadikan sebagai kajian akademisi yang mempelajari hukum perkawinan, khususnya mengenai kesepadanan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna menyelesaikan program studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat tentang kesepadanan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan contoh mengenai kesepadanan pernikahan bagi masyarakat.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dapat digunakan untuk mengetahui aspek orisinalitas dari tesis ini. Selain itu, hal tersebut sebagai antisipasi adanya unsur plagiat dalam tesis ini maupun diduplikat oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian yang berkaitan dengan tesis ini.

Adapun dalam kajian pustaka dalam bentuk karya ilmiah dengan tema kesepadanan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah (studi di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan) setingkat tesis maupun jurnal ialah sebagai berikut:

1. Dalam Tesis berjudul “Pergeseran Makna Kafa’ah dalam Pernikahan (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa’ah dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender di Kota Malang)” karya Humaidi, bahwa Pembentukan keluarga sakinah ini tidak akan mungkin terbentuk atau terbangun tanpa adanya keseimbangan dan kecocokan serta atas dasar kebaikan, cinta, dan kasih sayang antara calon suami dan istri. itu sebabnya dalam literatur fiqih *kafa’ah* (kesetaraan, keseimbangan) menjadi persoalan dan pembahasan yang menarik dan urgen untuk dikaji. Dalam sebagian masyarakat, kafa’ah masih banyak dimaknai haruslah sekufu atau sepadan dalam hal segalanya, semisal apabila dari golongan orang kaya, maka harus mendapatkan yang kaya, apabila dari keturunan kiyai, maka mencari pasangannya dari keturunan kiyai juga, apabila dari kalangan NU maka dapatnya dari NU juga, Muhammadiyah dapatnya dengan Muhammadiyah juga dan lain sebagainya berkaitan dengan Ikatan pernikahan sebagaimana tertuang dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga diharapkan dapat tercipta sebuah keluarga yang amanat, yang akan melahirkan generasi yang *waladun s{alihun yad’u lahu*, generasi *Rabbi Rad{iya*, generasi ‘*Abdan Syakura* dan generasi yang *Qurrata A’yun*, yang memiliki kesadaran fitriyah serta bertanggung jawab atas dirinya dan masyarakatnya.¹¹
2. Dalam Tesis yang berjudul ”Implementasi Kafa’ah dalam Keluarga Pesantren (Studi Penerapan Kafa’ah Kiai Pesantren Kab. Jombang)” Karangan Faisol Rizal, bahwa salah satu pertimbangan yang dianjurkan agama Islam ketika hendak melangsungkan perkawinan adalah kafa’ah. Kafa’ah sendiri dalam perkawinan merupakan faktor eksternal yang tidak digolongkan sebagai rukun perkawinan. Akan tetapi, kafa’ah turut menunjang terciptanya kebahagiaan pasangan suami istri dan menjamin

¹¹ Humaidi, “*Pergeseran Makna Kafa’ah Dalam Pernikahan (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa’ah Dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama Dan Aktifis Kesetaraan Gender Di Kota Malang)*”, (Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011).

perempuan dari kegagalan dalam berumah tangga. Pada praktiknya, dalam suatu komunitas tertentu, kafa'ah sering kali diidentikkan dengan penggolongan atau pengelompokan atas suatu komunitas eksklusif. Hal ini dapat dilihat pada praktik perkawinan dalam banyak pondok pesantren. Metode yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif dengan paradigma fenomenologis. Metode kualitatif sebagai metode yang dapat menggali makna dibalik data yang nampak. Adapun paradigma fenomenologis digunakan karena paradigma ini mengalir secara alamiah terkait dengan paradigma itu sendiri yaitu mencari data terkait dengan objek penelitian. Paradigma fenomenologis ini, menghindari asumsi umum dan menggenalisis objek. Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini terkait dengan teori kafa'ah adalah kiai dan keluarga pesantren terbagi menjadi dua varian dalam teori kafa'ah yaitu teori berlandaskan teori pemilihan pasangan dan teori kafa'ah berlandaskan fikih klasik. Adapun praktik kafa'ah di pesantren, maka praktik tersebut terdapat tiga corak, yaitu kafa'ah berdasar ilmu pengetahuan, kafa'ah berdasar nasab dan kafa'ah berdasar agama.¹²

3. Dalam jurnal berjudul “Kafa'ah dalam Pernikahan dan Relevansinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang)” karya Happy Nur, bahwa Keserasian atau kesepadanan dalam hukum perkawinan Islam atau yang dimaksud sekufu/kafa'ah adalah “keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan calon suami yang ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan bukan untuk kesahannya. Di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang memaknai kafa'ah dalam pernikahan berdasarkan kualitas keagamaan bukan hanya dari status sosialnya saja, dan kesekufuan antara suami dan isteri sebelum pernikahan memiliki hubungan yang erat dalam proses pembentukan keluarga harmonis. Kedua, Dengan adanya kafa'ah antara suami dan istri dapat memberikan kemudahan dalam menjalin komunikasi antara suami dan istri,

¹² Faisol Rizal, “Implementasi Kafa'ah Dalam Keluarga Pesantren “(Studi Penerapan Kafa'ah Kiai Pesantren Kab. Jombang”, (Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011).

meminimalisir percekocokan dalam rumah tangga, dan dapat membantu membentuk keluarga yang damai, nyaman dan sejahtera.¹³

4. Dalam jurnal berjudul “Kafa’ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam” karya H. Otong Husni Taufik, bahwa kafâ’ah dalam pernikahan antara calon suami dan calon istri dimaksudkan agar adanya keseimbangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga kehidupan, persoalan kafâ’ah sering dipahami secara tidak proposional dalam arti seseorang diharuskan menikah dengan lawan jenis yang sama derajatnya, kekayaannya dan kecantikan dan sebagainya, padahal semuanya itu hanyalah bersifat lahiriyah semata. Pasangan yang serasi diperoleh untuk mewujudkan rumah tangga yang tenang (sakinah), cinta (mawaddah), kasih (rahmah), banyak cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah upaya mencari calon suami atau istri yang baik, upaya tersebut bukanlah suatu kunci namun keberadannya dalam rumah tangga akan menentukan mampu atau tidaknya seseorang dalam membangun bahtera rumah tangga.¹⁴
5. Dalam jurnal berjudul “Kafa’ah dalam Perspektif Fiqh Islam dan Undang-Undang Negara Muslim” karya Nurcahaya, bahwa kebanyakan ahli fiqh menggambarkan konsep *kafa’ah* dengan memberikan pernyataan bahwa jika seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, hendaklah dilakukan antara mereka yang sekuflu. Maksudnya antara laki-laki dan perempuan tersebut terlihat adanya persesuaian keadaan, sama kedudukannya di tengah-tengah masyarakat, sama baik akhlaknya, seimbang kekayaannya dan lain-lain. Persamaan kedudukan tersebut biasanya akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera dan akan terhindar dari ketidak beruntungan, semua orang Islam bersaudara, tidak ada perbedaan kulit hitam dengan kulit putih. Melihat keadaan seperti ini, tulisan ini akan mencoba menguraikan bagaimana sesungguhnya

¹³ Happy Nur, “Kafaah Dalam Pernikahan dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang)”, *Journal Of Family Studies*, Vol. 3 No.3. April 2019.

¹⁴ Otong Husni Taufik, “*Kafâ’ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 8 No. 1 Desember 2017.

keberadaan *kafa'ah* serta pengaruhnya dalam undang-undang hukum keluarga di dunia Islam.¹⁵

Dari beberapa karya ilmiah (jurnal dan tesis) yang telah disajikan di atas, dapat dipahami bahwa ketiga karya ilmiah tersebut membahas tentang konsep *kafa'ah* dalam kajian pustaka. Sedangkan dua karya ilmiah lainnya, masing-masing membahas *kafa'ah* dalam implementasinya di lapangan, seperti yang dijelaskan dalam tesis yang berjudul *Kafa'ah dalam Pernikahan dan Relevansinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang)*, bahwa *kafa'ah* yang terjadi di daerah tersebut ialah *kafa'ah* dalam hal status sosial. Pada tesis yang berjudul *Implementasi Kafa'ah dalam Keluarga Pesantren (Studi Penerapan Kafa'ah Kiai Pesantren Kab. Jombang)*, bahwa kiai dan keluarga pesantren terbagi dua varian dalam teori *kafa'ah* yaitu teori berlandaskan teori pemilihan pasangan dan teori *kafa'ah* berlandaskan fikih klasik. Adapun praktik *kafa'ah* di pesantren, maka praktik tersebut terdapat tiga corak, yaitu *kafa'ah* berdasar ilmu pengetahuan, *kafa'ah* berdasar nasab dan *kafa'ah* berdasar agama.

Berdasarkan penjelasan singkat kelima judul penelitian di atas terdapat kesamaan dalam mengkaji dan membahas tentang *kafa'ah*. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah belum adanya penelitian terdahulu yang membahas tentang kesepadanan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah yang terjadi di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan terkait dengan kesepadanan dalam hal profesi dan suku yang kemudian ditinjau dengan hukum Islam. Oleh sebab itu penulis akan meneliti lebih dalam mengenai kesepadanan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah (studi kasus Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan).

¹⁵ Nurcahaya, "*Kafa'ah Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Undang-Undang Negara Muslim*", *Jurnal al-Muqaranah Program Studi Perbandingan Mazhab*, Vol. 5 No.1 Februari 2017.

G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir

1. Kajian Teori

Penelitian ini menggunakan teori *'urf* dan teori *mas{lahah al-mursalah*. Menggunakan teori *'urf* untuk menganalisa tradisi kesepadana pernikahan yang terjadi di masyarakat Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan. Adapun menggunakan teori *mas{lahah al-mursalah* untuk menganalisa kesepadana pernikahan dari sisi kemaslahatannya dalam upaya mewujudkan keluarga yang sakinah. Berikut penjelasannya:

a. Teori *'Urf*

Penelitian ini penulis menggunakan teori *'urf*. Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* (عرف-يعرف) Sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (المعروف) yang berarti mengetahui.¹⁶ Kalau dikatakan *فلان أولى فلان عرفا* (*Si Fulan lebih dari yang lain dari segi 'urf-nya*) maksudnya bahwa si Fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”.

Sedangkan secara terminologi kata *'urf*, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal *muamalat* (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. *'Urf* lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.¹⁷

Kata *'urf* juga terdapat dalam al-Qur'an dengan arti “*ma'ruf*” (معروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-A'raf (7): 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ...

Artinya: “Maafkanlah dia dan suruhlah berbuat *ma'ruf*...”¹⁸

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, t.t.), h. 987.

¹⁷ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), h. 162.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *al-Mubin (al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h.176.

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata '*adat* dan '*urf* tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: hukum itu didasarkan kepada '*adat* dan '*urf*, tidaklah berarti kata '*adat* dan '*urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata '*urf* adalah sebagai penguat terhadap kata '*adat*.¹⁹

Bila diperhatikan kedua kata itu dari segi asal penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaannya. Kata '*adat* dari bahasa Arab: عادة; akar katanya: 'âda, ya 'udu (عاد- يعود); mengandung arti تكرر (perulangan). Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan '*adat*. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut '*adat*, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Hal ini secara panjang lebar dijelaskan al-Suyuthi dalam kitabnya *al-Asyba>h wa al-Naz{âir*.²⁰

Kata '*urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.²¹

387 ¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2011), h.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, h. 388.

Perbedaan antara kedua kata itu, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu: ‘*adat* hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata ‘*adat* ini berkonotasi netral, sehingga ada ‘*adat* yang baik dan ada ‘*adat* yang buruk.’²² Definisi tentang ‘*adat* yang dirumuskan Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul al-Fiqh* cenderung ke arah pengertian ini, yaitu:

مَا أَعْتَدَاهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَاسْتَقَامَاتٍ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ

Artinya: ”Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.”

Kalau kata ‘*adat* mengandung konotasi netral, maka ‘*urf* tidak demikian halnya. Kata ‘*urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata ‘*urf* itu mengandung konotasi baik. Hal ini tampak dalam penggunaan kata ‘*urf* dengan arti *ma’rûf* dalam firman Allah swt., pada contoh di atas. Sejalan dengan pengertian tersebut, Badran mengartikan ‘*urf* itu dengan:

مَا أَعْتَدَاهُ جُمْهُورُ النَّاسِ وَالْقَوَّةُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَكَرَّرَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى تَمَكَّنَ أَثَرُهُ فِي نُفُوسِهِمْ وَصَارَتْ تَتَلَقَّاهُ عُقُولُهُمْ بِالْقَبُولِ

Artinya: ”Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.”²³

Musthafa Syalabi tidak melihat perbedaan kedua kata itu dari segi konotasi kandungan artinya (netral dan tidak netral) seperti diuraikan di atas, tetapi dari segi ruang lingkup penggunaannya. Kata ‘*urf* selalu digunakan untuk jamaah atau golongan, sedangkan kata ‘*adat* dapat digunakan untuk sebagian orang di samping berlaku pula untuk

²² *Ibid.*

²³ Qod{î Abdul Wahab al-Maliki al-Zuhaili, *al-Israf ‘ala Masail al-Khalaf*, (Tunisia: Matba’ah al-Iradah, t.t), h. 217.

golongan. Apa yang telah bisa dilakukan (menjadi kebiasaan) seseorang, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai '*adat* orang itu, namun tidak dapat dikatakan sebagai '*urf* orang itu.²⁴

Dari adanya ketentuan bahwa '*urf* atau '*adat* itu adalah sesuatu yang harus telah dikenali, diakui, dan diterima oleh orang banyak, terlihat ada kemiripannya dengan *ijmâ'*. Namun antara keduanya terdapat beberapa perbedaan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Dari segi ruang lingkupnya, *ijmâ'* harus diakui dan diterima semua pihak. Bila ada sejumlah kecil saja pihak yang tidak setuju, maka *ijmâ'* tidak tercapai. (Hanya sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa *ijmâ'* yang tidak diterima oleh beberapa orang saja, tidak memengaruhi kesahihan suatu *ijmâ'*). Sedangkan '*Urf* atau '*adat* sudah dapat tercapai bila ia telah dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dilakukan oleh semua orang.
- 2) *Ijmâ'* adalah kesepakatan (penerimaan) di antara orang-orang tertentu, yaitu para mujtahid, dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepakatan atau penolakannya. Sedangkan '*Urf* atau '*adat* terbentuk bila yang melakukannya secara berulang-ulang atau yang mengakui dan menerimanya adalah seluruh lapisan manusia, baik mujtahid atau bukan.
- 3) *Adat* atau '*urf* itu meskipun telah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat Islam, namun ia dapat mengalami perubahan karena berubahnya orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan *ijmâ'* (menurut pendapat kebanyakan ulama) tidak mengalami perubahan; sekali ditetapkan, ia tetap berlaku sampai ke generasi berikutnya yang datang kemudian.²⁵

Penggolongan macam-macam *adat* atau '*urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi:

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 388.

²⁵ *Ibid.*

1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini *'urf* itu ada dua macam:

- a) *'Urf qauli* (عرف قولي), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.²⁶ Kata *waladun* (ولد) secara etimologi artinya anak yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*mu'annat*). Penggunaan kata *walad* itu untuk laki-laki dan perempuan, (mengenai waris/harta pusaka) berlaku juga dalam al-Qur'an, seperti dalam surat al-Nisa>' (4): 11-12. Seluruh kata *walad* dalam kedua ayat tersebut yang disebutkan secara berulang kali, berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan.²⁷

Dalam kebiasaan sehari-hari (*'urf*) orang Arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan; sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan *'urf qauli* tersebut. Umpamanya dalam memahami kata *walad* pada surat al-Nisa>' (4): 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ

Artinya: "Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi

²⁶ Ibnu Irawan, Jayusman, dan Agus Hermanto, "Studi Fatwa al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus al-Iliyah Wa al-Ifta': Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan al-Qur'an", *Jurnal Nurani*, Vol. 19, No. 02 Tahun 2019, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2019), h. 312.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 390.

*keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal . . .*²⁸ (QS.al-Nisa>(4): 176)

Melalui penggunaan *‘urf qauli*, kata *kalalah* dalam ayat tersebut diartikan sebagai “orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki”. Dalam hal ini (dengan pemahaman *‘urf qaula*), anak laki-laki dapat meng-*hijab* saudara-saudara sedangkan anak perempuan tidak dapat. Kata *lahm* (لحم) artinya adalah “daging”, baik daging sapi, ikan, atau hewan lainnya. Pengertian umum *lahmun* yang juga mencakup daging ikan ini terdapat dalam al-Qur’an, surat al-Nahl (16): 14:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا . . .

Artinya: “Allah yang memudahkan laut untukmu supaya kamu dapat memakan ikannya yang segar . . .”²⁹ (QS. al-Nahl (16): 14)

Namun dalam adat kebiasaan berbahasa sehari-hari di kalangan orang Arab, kata *lahmun* itu tidak digunakan untuk ikan. Karena itu, jika seseorang bersumpah, “Demi Allah saya tidak akan memakan daging”, tetapi ternyata kemudian ia memakan daging ikan, maka menurut *‘adat* masyarakat Arab, orang tersebut tidak melanggar sumpah.

- b) *‘Urf fi’li* (عرف فعلی), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya; (1) kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli (2) kebiasaan saling

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Mubin (al-Qur’an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 106

²⁹ *Ibid.*, h. 268

mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.³⁰

2) Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi kepada:

- a) *Adat* atau *'urf* umum (عرف عام), yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Umpamanya: (1) menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil (2) dimana-mana bila memasuki pemandian umum (kolam renang) yang memungut bayaran, orang hanya membayar seharga tarif masuk yang ditentukan tanpa memperhitungkan berapa banyak air yang dipakainya dan berapa lama ia menggunakan pemandian tersebut.³¹
- b) *Adat* atau *'urf* khusus (عرف خاص), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan disembarang waktu. Umpamanya: (1) *'adat* menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (*matrilineal*) di Minangkabau dan melalui bapak (*patrilineal*) di kalangan suku Batak, (2) orang Sunda menggunakan kata paman hanya untuk adik dan ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah; sedangkan orang Jawa menggunakan kata “paman” itu untuk adik dan untuk kakak dari ayah (3) bagi masyarakat tertentu, penggunaan kata “budak” untuk anak-anak dianggap menghina, karena kata itu hanya terpakai untuk hamba sahaya; tetapi bagi masyarakat lainnya kata “budak” biasa digunakan untuk anak-anak.³²

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 390

³¹ Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *Jurnal Asas*, Vol. 7 No. 1, Januari 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 31

³² *Ibid.*

- 3) Dari segi penilaian baik dan buruk, ‘*adat* atau ‘*urf*’ itu terbagi kepada:
- a) ‘*Adat* yang *shâhih* (عرف صحيح), yaitu ‘*adat* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu; mengadakan acara *halal bi halal* (silaturahmi) saat hari raya; memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.
 - b) ‘*Adat* yang *fâsid* (عرف فاسد), yaitu ‘*adat* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, dan *kumpul kebo* (hidup bersama tanpa nikah).³³

Dalam literatur yang membahas kehujahan ‘*urf*’ atau ‘*adat*’ dalam istinbath hukum, hampir selalu yang dibicarakan adalah tentang ‘*urf*’ atau ‘*adat*’ secara umum. Namun di atas telah dijelaskan bahwa ‘*urf*’ atau ‘*adat*’ yang sudah diterima dan diambil alih oleh *syara*’ atau yang secara tegas telah ditolak oleh *syara*’, tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujahannya. Dengan demikian, pembicaraan tentang kehujahan ‘*urf*’ ini sedapat mungkin dibatasi pada ‘*urf*’ bentuk keempat (sebagaimana di sebutkan di atas), baik yang termasuk pada ‘*adat*’ atau ‘*urf*’ yang umum dan yang tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan), maupun ‘*adat*’ khusus dan yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya sudah berubah.³⁴

Secara umum ‘*urf*’ atau ‘*adat*’ itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsân* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 392

³⁴ *Ibid.*, h. 399

istihsân itu adalah *istihsân al-‘urf* (*istihsân* yang menyandar pada ‘urf. Oleh ulama Hanafiyah, *urf* itu didahulukan atas *qiyâs khafî* dan juga didahulukan atas *nash* yang umum, dalam arti: ‘urf itu men-takhsis umum *nash*. Ulama Malikiyah menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukan nya dari hadis ahad.

Ulama Syafi‘iyah banyak menggunakan ‘urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam *syara’* maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مَطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya:”Setiap yang datang dengannya *syara’* secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam *syara’* maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah kepada ‘urf.”³⁵

Contoh dalam hal ini, umpamanya: menentukan arti dan batasan tentang tempat simpanan (حرز) dalam hal pencurian; arti berpisah dalam *khiyar* majelis; waktu dan kadar haid, dan lain-lain. Adanya *qaul qadim* (pendapat lama) Imam Syafi‘i di Irak, dan *qaul jadid* (pendapat baru) nya di Mesir, menunjukkan diperhatikannya ‘urf dalam *istinbath* hukum di kalangan Syafi‘iyah.³⁶

Dalam menanggapi adanya penggunaan ‘urf dalam fiqh, al-Suyut{i mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:”Adat (‘urf) itu menjadi pertimbangan hukum.”³⁷

Alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap ‘urf tersebut adalah hadis yang berasal dari Abdullah ibn Mas’ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu:

³⁵ Al-Suyuti, al-Asbah wa al- Nad{air li Suyuti, h. 98.

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid., h. 394

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: "Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah adalah baik."³⁸

Di samping itu adalah pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan orang banyak), dalam arti, orang banyak akan mengalami kesulitan bila tidak menggunakan 'urf tersebut. Bahkan ulama menempatkannya sebagai syarat yang disyaratkan".

الْمَعْرُوفُ عُرفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: "Sesuatu yang berlaku secara 'urf adalah seperti suatu yang telah disyaratkan."³⁹

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada 'urf, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan *nas*{. Para ulama yang mengamalkan 'urf itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima 'urf tersebut, yaitu:

- 1) 'Adat atau 'urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi 'adat atau 'urf yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Umpamanya tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal yang sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular.⁴⁰
- 2) Adat atau 'urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan 'adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini al-Suyut{i mengatakan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا إِطْرَدَتْ, فَإِذَا اضْطَرَبَتْ فَلَا

³⁸ Imam al-Bani, *al-Silsilah al-Dho'ifah wa al-Maudu'ah*, Jilid 2 (t.t), h. 17.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2011), h.

379.

⁴⁰ *Ibid.*

Artinya: "Sesungguhnya 'adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan."⁴¹

Umpamanya: kalau alat pembayaran resmi yang berlaku di suatu tempat hanya satu jenis mata uang, umpamanya dollar Amerika, maka dalam suatu transaksi tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang yang berlaku. Tetapi bila di tempat itu ada beberapa alat pembayaran yang sama-sama berlaku (ini yang dimaksud dengan: kacau), maka dalam transaksi harus disebutkan jenis mata uangnya.⁴²

- 3) 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu; bukan 'urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti 'urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau 'urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاضُ إِنَّمَا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمُتَأَخِّرِ

Artinya: "Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian."⁴³

Dalam hal ini, Badran memberikan contoh: Orang yang melakukan akad nikah dan pada waktu akad itu tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil, sedangkan 'adat yang berlaku waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Kemudian 'adat ditempat itu mengalami perubahan, dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami

⁴¹ Muhammad Mustofa al-Zuhaili, *al-Qaidah al-Fiqhiyyah wa Tatbiqotuha fil madhahib al-Arba'ah*, Juz 1, h. 323.

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 379

⁴³ Muhammad Siddiqy Ali Barnu, *al-Wajiz fi lydohii Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*, Juz 1, h. 297.

berpegang pada '*adat* yang sedang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan si istri minta dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Maka berdasarkan pada syarat dan kaidah tersebut, si suami harus melunasi maharnya, sesuai dengan '*adat* yang berlaku waktu akad berlangsung dan tidak menurut '*adat* yang muncul kemudian.

- 4) '*Adat* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara*' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan '*adat* sah; karena kalau '*adat* itu bertentangan dengan *nash* yang ada atau bertentangan dengan prinsip *syara*' yang pasti, maka ia termasuk '*adat* yang *fâsid* yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.⁴⁴

Dari uraian di atas jelaslah bahwa '*urf* atau '*adat* itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas *adat* itu bukanlah karena semata-mata ia bernama '*adat* atau '*urf*. '*Urf* atau '*adat* itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. '*Adat* atau '*urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijmâ*' atau maslahat.⁴⁵

'*Adat* yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijmâ*' walaupun dalam bentuk *sukûti*. '*Adat* itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai '*adat* seperti ini berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada *nash* yang secara langsung mendukungnya.

b. Teori *Mas{lahah al-Mursalah*

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, sunnah, *ijma*', *qiya*s, *istihsan*, *mas{lahah al-mursalah*, '*urf*, *istishab*, *syar'u man qablana*.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 379.

⁴⁵ *Ibid.*

Islam menyajikan sistem kehidupan yang komprehensif berdasarkan tuntunan ilahi. Karena Islam dituntut untuk senantiasa memberi suatu solusi dari setiap masalah yang muncul dengan seiring berkembangnya zaman dan era yang modern ini. Kaidah ini tidak ditegaskan dalam *nas*, serta tidak ada satu dalil pun yang menolaknya maupun mengakuinya.⁴⁶

Mas{lahah al-mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *mas{lahah* dan *al-mursalah*.⁴⁷ Kata *mas{lahah* berasal dari kata kerja bahasa Arab (صَلَحَ - يَصْلُحُ) menjadi (صُلْحًا) atau (مَصْلَحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.⁴⁸ Kata *mas{lahah* kadang-kadang disebut juga dengan (طَلَبُ الْإِصْلَاحِ) yang artinya mencari yang baik (الْإِسْتِصْلَاحُ)⁴⁹ sedangkan kata *al-mursalah* adalah isim *maf'ul* dari *fi'il mad'li* dalam bentuk *s/ulasi*, yaitu (رَسَلَ) , dengan penambahan huruf alif dipangkalnya, sehingga menjadi (أَرْسَلَ) secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti (bebas). Kata terlepas dan bebas di sini bila dihubungkan dengan kata *masalah* maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.⁵⁰

Perpaduan dua kata menjadi *mas{lahah al-mursalah* yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat.⁵¹ al-Ghazali merumuskan pengertian *masalah mursalah* sebagai berikut:

⁴⁶ Jalaluddin Abdurrahman, *al-Mas{alih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'* (Mesir: Matba'ah as-Sa'adah, 1403), h. 23. di dalam Disertasi Maimun, "Maqasid al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia". (Disertasi Program Doktor Hukum Keluarga Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017).

⁴⁷ Sebagian ulama menyebut *mas{lahah al-mursalah* dengan istilah al-Munasib al-Mursal (dipopulerkan oleh Ibnu Hajib dan Baidhawi), *al-Istid{al al-Mursal* (dipopulerkan oleh al-Syatibi) dan al-Istislah (dipopulerkan oleh al-Ghazali). Lihat Rahmat Syafi'i, Ilmu Ushul Fiqih, Cet. III, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 118.

⁴⁸ Chaerul Umam, *Usjul al-Fiqih I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 135.

⁴⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Masdar al-Tasyri' al-Islami Fi> ma> La> Nassa Fih*, Cet. III, (Kuwait: Da>r al-Qalam, 1972), h. 85.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Usjul al-Fiqih*, h. 332.

⁵¹ Muhammad Rusfi, *Usjul al-Fiqih-I*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017), h. 121-122.

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِاعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

Artinya: “Apa-apa (*mas{lahah}*) yang tidak bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *mas{lahah al-mursalah}* adalah *mas{lahah}* di mana syari’ tidak mensyari’atkan hukum untuk mewujudkan *maslahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁵²

Berdasarkan definisi di atas maka *mas{lahah al-mursalah}* ialah menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur’an maupun Hadis, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.⁵³ Seperti kaidah ushul fiqh berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”,⁵⁴

Mas{lahah al-mursalah} dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Atau disebut juga sebagai sifat yang melekat pada struktur hukum berupa upaya untuk mengambil hal positif dan meninggalkan yang negatif bagi manusia, nyata maupun tersembunyi dalam pandangan manusia.⁵⁵

⁵² Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Usjul al-Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansani, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet-8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123.

⁵³ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *al-Mas{lahah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 (01), 2018, h. 65-66. tersedia di : <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140> (12 Mei 2019)

⁵⁴ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, terjemah Wahyu Setiawan, Cet.ke-2, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 2.

⁵⁵ Mohammad Rusfi, *Validitas Mas{lahah al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, *Al-Adalah* Vol. XII, No. 1 (Juni 2014), h.64. dapat di akses di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175>, (07 April 2019, 11.44 WIB)

Hakikat dari *mas{lahah al-mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalbul mas{alih au manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar'ul mafasid*) bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan syariah (*maqas{id syari>'ah*) dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengetahuinya. Hal ini selaras dengan pendapat Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah yang mengungkapkan bahwa *mas{lahah* adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kebaikan masyarakat dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi.⁵⁶ *Mas{lahah* terdapat dua macam yaitu:

- 1) *Mas{lahah al-mu'tabarah* ialah suatu maslahat atau kebaikan yang telah diakui oleh Islam. Hal-hal yang telah diatur dalam al-Quran dan Hadis serta sudah pasti hukumnya sehingga manusia tinggal menjalankan peraturannya.
- 2) *Mas{lahah al-mursalah* yaitu mengakui suatu kemaslahatan karena adanya peristiwa-peristiwa baru yang timbul setelah wafatnya Rasulullah saw.⁵⁷ Adapun objek *mas{lahah al-mursalah* adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun *nas{* (al-Qur'an dan hadis) yang dapat dijadikan dasarnya.⁵⁸

Ulama bersikap sangat hati-hati dalam menggunakan *mas{lahah al-mursalah* sebagai hujjah, sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syari'at, berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, ulama menyusun syarat-syarat *mas{lahah al-mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syaratnya ada yaitu:

⁵⁶ *Ibid.*, h.37

⁵⁷ Susiadi AS, *Buku Daras, Usjul al-Fiqh I*, (Bandar Laampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2010), h.106

⁵⁸ Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 205.

- 1) *Mas{lahah* yang dimaksud adalah *mas{lahah* yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika maslahat itu berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan maslahat. Contoh dalam persoalan larangan bagi suami untuk menalak istrinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini tidak mengandung maslahah, bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat. Hubungan suami isteri ditegakkan atas dasar suatu paksaan undang-undang, bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang dan saling mencintai.⁵⁹
- 2) *Mas{lahah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja. Imam al-Ghazali memberi contoh orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang membunuh mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Dan apabila kaum muslimin memerangi orang Islam yang membentengi orang kafir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang Islam yang membentengi orang kafir tersebut. Demi memelihara kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya dengan cara melawan atau memusnahkan musuh-musuh mereka.
- 3) *Mas{lahah* itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nas}, al-Qur'an dan sunnah, maupun ijma' dan qiyas}.
- 4) *Mas{lahah al-mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalah tidak diselesaikan dengan cara ini,

⁵⁹ Chairul Umam, *Usjul al-Fiqh I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 137.

maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.⁶⁰

Imam al-Ghazali juga memberikan beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbatkan hukum, yaitu:

- 1) *Mas{lahah* itu sejalan dengan jenis tindakan syara'
- 2) *Mas{lahah* itu tidak bertentangan dengan nash syara'
- 3) *Mas{lahah* itu termasuk dalam kategori *mas{lahah* yang d}aruriyyat, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.⁶¹

Ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *mas{lahah al-mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan *mas{lahah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih belum jelas atau hanya prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Selama *mas{lahah* tersebut mengandung manfaat secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan Hadis⁶² dan mempunyai tujuan syariat yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam teori maqashid syariah yaitu menjaga agama (*hifz{ al-di>n*), melindungi jiwa (*hifz{ al nafs*); melindungi akal (*hifz{ al-aql*); melindungi kelestarian manusia (*hifz{ al-nasl* atau *hifz{ al-nasab*); dan melindungi harta benda (*hifz{ al- ma>l*).⁶³

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Us{ul al-Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 337.

⁶¹ Muhammad Rusfi, *Us{ul al-Fiqih-1*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017), h. 130-133.

⁶² Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "al-Maslahah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 (01), 2018, h. 71. tersedia di : <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140>, (19 November 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁶³ Agus Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali)", *Jurnal al-'Adalah*, Vol. 14, No. 2, 2017, h. 446, diakses tanggal 18 Agustus 2021, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2. Kerangka Pikir

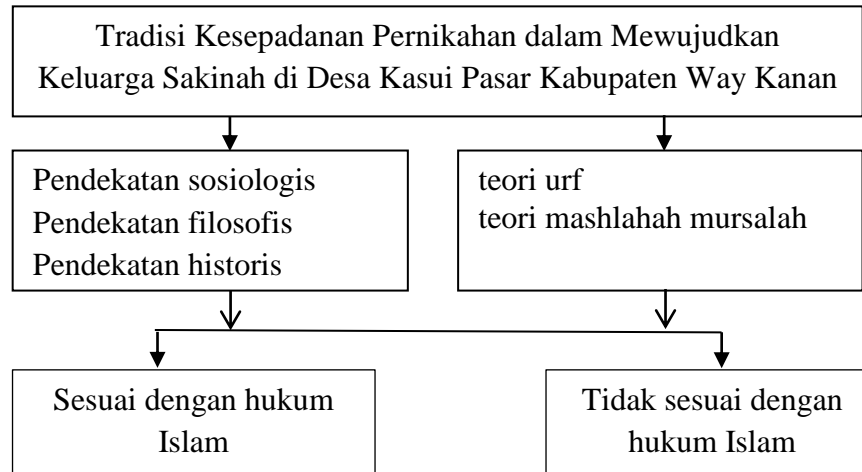
Kerangka pikir disusun untuk menjadi bahan acuan dan mengarahkan peneliti dalam melakukan analisis secara komprehensif dan terukur.⁶⁴ Menganalisis mengenai pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori. Teori pada hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi yang menjadikan suatu pandangan sistematis, tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.⁶⁵ Kerangka pikir merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti. Variabel dalam judul penelitian ini meliputi kesepadanan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah (studi di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan).

Tradisi masyarakat yang terjadi di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan bahwa setiap masyarakat Desa Kasui Kabupaten Way Kanan yang bersuku Jawa Serang dan mempunyai mata pencaharian sebagai pengusaha toko emas, diharuskan menikah juga dengan orang yang bersuku Jawa Serang dan bermata pencaharian sebagai pengusaha toko emas. Hal ini bertujuan agar perkawinan mereka langgeng. Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

⁶⁴ IAIN Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi*, diterbitkan oleh Program Pascasarjana (PPs), Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2012, h. 22

⁶⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 14

Gambar 1.
Bagan Kerangka Pikir



H. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan sosiologis, filosofis dan historis. Melalui pendekatan sosiologis dalam penelitian ini, guna mengetahui secara komprehensif mengenai kesepadanan pernikahan sebagai salah satu syarat dalam membentuk keluarga sakinah dimasyarakat Kasui. Pendekatan filosofis guna mengetahui asal usul tradisi kesepadanan pernikahan sebagai syarat nikah yang terdapat di Desa Kasui Pasar Way Kanan, adat kebiasaan ini yang dalam pernikahan dalam memilih calon pasangan haruslah sesuai dengan hukum adat yang berlaku di desa tersebut. Serta melalui pendekatan historis guna mengetahui sejarah adat tradisi pernikahan yang mengharuskan satu suku dan satu profesi di desa tersebut.

I. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang penting untuk dapat tercapainya tujuan dari sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan terukur. Serta kedalaman dalam menganalisis, dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Pada hakikatnya, penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realita tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat.⁶⁶ yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari KUA dan masyarakat Desa Kasui Pasar Way Kanan guna memperoleh data yang berhubungan dengan kesepadanan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah, dan mengetahui bagaimana praktik dan penerapan kesepadanan tersebut dalam hukum Islam dan hukum adat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara terminologis penelitian kualitatif menurut Bagdam dan Taylor merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diminati.⁶⁷ Dalam penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan meninjau adat kebiasaan yang diterapkan dalam kesepadanan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

3. Sumber Data

Dalam penyusunan ini dibedakan menjadi tiga sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder:

- a. Data primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai data primer adalah hasil wawancara dengan masyarakat Desa Kasui Pasar Kabupaten Way

⁶⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan ke-10, Edisi 1 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 28.

⁶⁷ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4

Kanan yang bersuku Jawa Serang yang bermata pencaharian pengusaha emas dan tokoh adat Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan.

- b. Data sekunder adalah data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpulan data juga dapat dikatakan sebagai data pendukung dalam penelitian sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup buku-buku hukum Islam dan hukum adat, karya ilmiah, mengenai kesepadanan atau sekufu dalam pernikahan yang berhubungan dengan penelitian.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶⁸ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 24 (dua puluh empat) masyarakat Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan yang berprofesi sebagai penjual emas.

Sampling adalah bagian dari individual atau populasi yang akan diteliti. Pada penelitian ini penulis dalam pengambilan sampel ditentukan melalui *purposive sampling*, yaitu penarikan sample yang akan dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu.⁶⁹ Adapun responden dalam penelitian ini yaitu 18 (delapan belas) orang masyarakat Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan, yang terdiri dari 10 orang yang menikah dengan sesama penjual emas, 5 orang yang tidak menikah dengan sesama penjual emas, 1 orang selaku tokoh adat, 1 orang tokoh agama, dan 1 orang tokoh masyarakat Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dari sumber data, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

⁶⁸ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo), h.2.

⁶⁹ *Ibid.*, h.3.

a. Observasi

Teknik Observasi menurut Pauline V. Young “*Observation May be defined as systematic viewing couplet with consederation of the seen phenomena*”.⁷⁰ Maksudnya observasi diartikan sebagai sistematika pandangan dengan memperhatikan gejala-gejala yang tampak. Jadi observasi adalah mengamati atau mencatat secara sistematis mengenai keadaan yang diselidiki. Adapun yang diobservasi adalah kesepadanan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah pada masyarakat Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁷¹ Dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data, penyusun melakukan wawancara masyarakat Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan yang bersuku Serang yang bermata pencaharian pengusaha emas dan tokoh adat Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut. Dokumen yang dibutuhkan antara lain foto bersama narasumber dan berkas hasil wawancara bersama narasumber.

⁷⁰ Pauline V. Young, *Scientifich Social Suveys and Research*, (New Delhi: Prentichall, 1973), h.161.

⁷¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 95

6. Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai/relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku, literatur, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit) atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan mudah diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

7. Analisis Data

Dalam penyusunan menganalisis data secara kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada kesepadanan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan. Dengan pendekatan berfikir induktif pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena kemudian menggunakan metode induktif yang mengumpulkan data yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

BAB II

KONSEP KESEPADANAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Hukum Perkawinan di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-nikaḥ*.⁷² *Al-nikaḥ* bermakna *al-watʿi* dan *al-dammu wa al-tadaḥhul*, terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jamʿu* atau ibarat *al-watʿu wa al-ʿaqdu* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.⁷³ Karena nikah adalah akad, maka pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *misʿaqan galizʿa* untuk memenuhi perintah Allah *swt.*, dan melaksanakannya merupakan ibadah,⁷⁴ dengan tujuan yang bersifat material yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang memiliki latar belakang sosial-budaya, keinginan serta kebutuhan mereka yang berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan serta disepakati bersama.⁷⁵ Dengan demikian, dalam konteks sosiologi, bahwa perkawinan tidak akan terjadi bila tidak ada kesepakatan bersama, untuk bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh nabi Muhammad *saw.*, untuk berpuasa. Orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari perbuatan tercela yang keji, yaitu perzinahan.

⁷² Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penterjemahan al-Qurʿan, 1973), h. 468.

⁷³ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 38

⁷⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

⁷⁵ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), h. 137

Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam. Di dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷⁶

Perkawinan atau sering disebut pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁷⁷ Sebagaimana Firman Allah QS. al-Zariyyat [49]: 49 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (QS. al-Zariyyat [49]: 49)⁷⁸

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* mendefinisikan nikah sebagai berikut:

الزَّوْجِيُّهٖ سُنَّةٌ مِنْ سُنَّةِ اللَّهِ فِي الْخَلْقِ وَالتَّكْوِينِ وَهِيَ عَامَّةٌ لَا يَسُدُّ عَنْهَا عَالَمُ الْإِنْسَانِ
أَوْ عَالَمُ الْحَيَوَانَاتِ أَوْ عَالَمُ النَّبَاتِ

Artinya: "Perkawinan adalah salah satu sunnatullah dari hukum penciptaan dan pembentukan yang umum berlaku tidak dapat dicegah dari

⁷⁶ Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*, Jurnal Al-'Adalah, Vol. XII, No. 4 Desember 2015, h.807. Dapat dilihat di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215/363>

⁷⁷ Tihami dan Suhari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 6.

⁷⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Mubin (al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 522.

semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.⁷⁹

Kata nikah dalam al-Qur'an terkadang digunakan untuk menyebut akad nikah, tetapi terkadang juga dipakai untuk menyebut suatu hubungan seksual. Firman Allah swt., dalam QS. al-Nisa>' [4] ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".⁸⁰ (QS. al-Nisa>' ayat 3)

Contoh lain adalah firman Allah swt., QS. al-Nisa>'[4]: 22, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)".⁸¹ (QS. al-Nisa>': 22)

Kedua ayat di atas dipahami untuk mengurai dan mengartikan semata-mata untuk melaksanakan akad nikah (menikah), bukan berarti *al-wat{ 'u* atau *al-jima> 'u* (melakukan hubungan seksual). Sedangkan contoh menikah yang artinya melakukan hubungan seksual⁸² (*al-wat{ 'u* atau *al-*

⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Beirut Lebanon: Da>r Al-Fikr), h.1

⁸⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Mubin (al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 77

⁸¹ *Ibid.*, h. 81

⁸² M. Quraisy Syihab, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cetakan Ke-6, (Bandung: Mizan, 1997), h.191.

jima> 'u) adalah sebagaimana difirmankan Allah swt., dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.⁸³ (QS. al-Baqarah ayat 230)

Ayat ini menjelaskan bahwa nikah diartikan sebagai *al-watf'u* atau *al-jima*> 'u (melakukan hubungan seksual). Apabila seorang istri yang telah diceraikan suaminya yang pertama sebanyak dua kali, maka ia masih dapat melakukan *ruju'* dengan suami yang pertama. Apabila suami telah menjatuhkan *talaq* yang ketiga kalinya, maka suami sudah tidak bisa menikah lagi dengan mantan istrinya, kecuali ada *muhallil*. Jadi si mantan istri harus menikah dengan laki-laki lain (suami yang kedua), lalu bercerai dan melaksanakan *iddah*, baru dapat menikah lagi dengan suami yang pertama.⁸⁴

Para ulama' berbeda pendapat dalam memahami makna nikah, ada yang memaknai secara hakiki dan secara *majazi*, sebagai berikut:

Pendapat pertama (Imam Syafi'i) yang dishahihkan oleh Abu Thayib, Mutawali dan Qadi Husain: bahwa nikah pada hakikatnya digunakan untuk menyebut akad nikah, dan terkadang dipakai secara *majazi* untuk menyebutkan hubungan seksual. Ini adalah pendapat shahih dari mad{hab Syafi'i.⁸⁵

⁸³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Mubin (al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 23.

⁸⁴ *Ibid.*, h. 191

⁸⁵ Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar*, (T.k: t.p, t.t), h.460.

Pendapat kedua (Imam Hanafi) mengemukakan bahwa nikah pada hakikatnya dipakai untuk menyebut hubungan seksual. Tetapi kadang dipakai secara majazi untuk menyebut akad nikah⁸⁶.

Terkadang kata pernikahan disebut dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama; makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat 'izzah (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.⁸⁷

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan kebutuhan yang diminati oleh setiap naluri manusia dan dianggap oleh Islam sebagai ikatan yang sangat kokoh atau *mis'aaqan galiz'a*. Karena itu, pernikahan hendaknya dianggap sakral dan dimaksudkan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan abadi, tidak hanya untuk sementara waktu seperti yang dianut oleh paham yang membolehkan nikah mut'ah sampai kini.⁸⁸ Allah *swt.*, menganjurkan perkawinan lewat firman-Nya yaitu sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu

⁸⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu 'Ala Mad'ahibi al-Arba'ah*, (Kairo: Da>rul Hadis al-Qahira, t.t), Juz 4, h.7.

⁸⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h.7.

⁸⁸ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah)*, h. 6.

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..” (QS. al-Nu>r: 32)⁸⁹

Ayat di atas Allah swt., menyeru para wali agar menikahkan orang-orang yang masih sendirian (laki-laki yang belum beristeri dan perempuan yang belum bersuami yang ada di bawah perwaliannya). Begitupun terhadap hamba sahaya. Anjuran di sini tidak terbatas pada suatu kondisi tertentu akan tetapi pada segenap kondisinya, hingga disaat orang itu bertarap sosial ekonomi yang rendah (miskin), karena Allah swt., yang akan memampukan mereka (untuk kawin) dengan karunia-Nya. Firman Allah swt.:

... إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “...Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui” (QS. al-Nu>r: 32)⁹⁰

Selain itu, dalam firman-Nya yang lain:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ ...

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya...” (QS. al-Nu>r: 33)⁹¹

Tidak mampu untuk kawin namun menjaga kesucian diri dari maksiat, berarti bersabar menahan gejolak nafsu yang selalu timbul dan cenderung mengarah pada keburukan (maksiat). Maka Islam memberikan pengendalian kebinalan salah satunya dengan cara berpuasa, sebagaimana sabdanya:

...وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه جماعة)

Artinya: “...Dan bilamana ia belum mampu kawin, hendaklah ia berpuasa karena berpuasa itu dapat menundukkan nafsu birahi (perisai gejolak nafsu syahwat). (HR. Jamaah)⁹²

⁸⁹ Kementerian Agama RI, *al-Mubin (al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 354.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ...

Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan...” (QS. al-Ra’ad: 38)⁹³

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah *swt.*, menjadikan istri-istri untuk manusia (laki-laki) dengan tujuan agar mendapatkan *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang) dan mendapat keturunan sebagai generasi penerus. Tentunya apa yang diperoleh dalam hidup bersama tersebut harus dengan jalan yang ditetapkan Allah *swt.*, yaitu melalui perkawinan yang sah serta dirihoi-Nya. Dengan demikian, secara tersirat, penciptaan isteri-isteri itu sebagai realisasi dan perwujudan dari anjuran perkawinan dengan berbagai faidah dan tujuannya.⁹⁴

Begitu pula pada hadis Nabi *saw.*:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

Artinya: “Wahai kaum muda, barang siapa di antara kalian mampu menyipakan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barangsiapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng.” (Muttafaq ‘Alaih)⁹⁵

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Barangsiapa yang memiliki kemampuan, hendaknya ia kawin” (HR. Ibnu Majah)⁹⁶

⁹² Al-Hafiz{ Ibnu Hajar Asqalany, *Terjemah Bulugh al-Mara>m*, Penerjemah Muh. Sjanel Sukandy, Cetakan Ke-12, (Bandung: Al-Ma’arif, 1996),h. 385.

⁹³ *Ibid.*, h. 254

⁹⁴ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah)*, h. 11.

⁹⁵ Al-Hafiz{ Ibnu Hajar Asqalany, *Tarjamah Bulughul Maram*, Penerjemah Muh. Sjanel Sukandy, Cetakan Ke-12, (Bandung:Al-Ma’arif, 1996),h. 385.

⁹⁶ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah)*, h. 12.

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan mempunyai tujuan sebagaimana keinginan manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tentram dan bahagia dalam suasana cinta dan kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah swt. Perkawinan merupakan jalan untuk menyalurkan naluri manusia, untuk memenuhi tuntutan nafsu syahwatnya dengan tetap memelihara keselamatan agama yang bersangkutan. Dan apabila syahwat telah mendesak, padahal kemampuan kawin belum cukup supaya menahan diri dengan jalan berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah agar mempunyai daya mental dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan godaan setan yang menarik-narik untuk berzina⁹⁷. Untuk itu ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam di antaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan bagi melanjutkan generasi yang akan datang, hal ini dapat dilihat dalam Qur'an surat al-Nisa>' ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".⁹⁸ (QS. al-Nisa>' ayat 1)

- b. Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia, yang penuh ketenangan hidup, dan rasa kasih sayang. Seperti di dalam surat al-Ru>m ayat 21:

⁹⁷ Romlah, *Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil*, Jurnal Al-A'dalah Vol. XIII, (1 Juni 2016), h. 36

⁹⁸ Kementerian Agama RI, *al-Mubin (al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 77

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".⁹⁹ (QS. al-Ru>m ayat 21)

- c. Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
- d. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang di atur oleh syari'ah.¹⁰⁰

Menurut Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, tujuan perkawinan yaitu:

- a. Menjaga kemaluan suami istri dengan menjaga pandangan masing-masing di antara keduanya, dengan perjnjian ini hanya kepada pasangannya tidak menyerahkan pandangan kepada laki-laki atau wanita lain.
- b. Memperbanyak umat lewat keturunan untuk memperbanyak hamba-hamba Allah dan orang-orang yang mengikuti Nabi Nya, sehingga terealisasi kebangsaan di antara mereka dan saling tolong menolong dalam berbagai aktivitas kehidupan.
- c. Menjaga nasab yang dengannya terwujud pengenalan antar sesama, saling menyayangi dan tolong menolong sekiranya tidak ada akad nikah dan upaya menjaga kemaluan dengan pernikahan, maka banyak nasab yang

⁹⁹ Kementerian Agama RI, *al-Mubin (al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 350

¹⁰⁰ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Cetakan ke 3, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2010), h. 80

tidak teridentifikasi dan kehidupan ini menjadi anarkis, tidak ada waris, tidak ada hak, tidak ada pangkal dan cabang.

- d. Dengan pernikahan dapat ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri, setiap manusia membutuhkan teman pendamping dalam hidupnya, berbagi rasa dengannya dalam suka dan duka dalam kelapangan dan kesusahan.
- e. Berbagi urusan rumah tangga dan keluarga dapat tertangani dan terurus karena bersatunya suami istri, yang sekaligus menjadi benih tegaknya masyarakat. Seorang suami bekerja dan mencari penghidupan lalu memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan, sementara istri menata rumah, mengurus kebutuhan hidup mendidik anak-anak dan menangani urusan mereka dengan begitu keadaan dan urusan menjadi tertata.¹⁰¹

4. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Asas-asas dan atau prinsip-prinsip perkawinan yang dimaksud di sini adalah dasar-dasar atau norma-norma umum yang seharusnya dipegangi dan sekaligus diamalkan oleh pasangan dalam menempuh bahtera rumah tangga menurut hukum Islam.

Ada beberapa ayat al-Quran yang berbicara sekitar prinsip-prinsip perkawinan, di antaranya:

... فَأَلْقَيْنَ بَشِيرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ...

Artinya: "... Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu" ... (Q.S. al-Baqarah [2]: 187)¹⁰²

Prinsip perkawinan yang digambarkan dalam ayat di atas bahwa suami adalah pakaian isteri dan isteri adalah pakaian suami. Gambaran sebagai pakaian, mengingatkan bahwa fungsi suami dan isteri adalah untuk saling menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutupi, menyempurnakan, dan memuliakan satu sama lain.¹⁰³

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Mubin, (Al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 29.

¹⁰³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 348.

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ...

Artinya: “... Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya”...(Q.S. al-Baqarah [2]: 228)¹⁰⁴

Maksud dari ayat ini bahwa seorang perempuan mempunyai hak yang seimbang dari suaminya seperti baik dalam pergaulan sehari-hari, meninggalkan hal-hal yang dapat mencelakakan istri dan lain sebagainya. Namun, pihak suami mempunyai satu tingkat kelebihan, tentang hak, seperti yang harus ditaati disebabkan maskawin dan belanja yang dikeluarkan dari kantong para suami.¹⁰⁵

... فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ ...

Artinya: “... Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan...” (Q.S. al-Baqarah [2]: 233)¹⁰⁶

Imam al-Qurtubi menjelaskan bahwa penetapan al-Qur'an tentang bayi disapih setelah dua tahun disusui adalah untuk menghindari konflik dan perselisihan antara orang tua (suami isteri). Meski syari'at menetapkan dua tahun, bayi boleh disapih sebelum mencapai dua tahun itu, jika ada alasan yang dibenarkan serta dengan kesepakatan dan keridaan suami isteri. Tentunya hal itu tidak boleh membahayakan kondisi bayi.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ...

Artinya: “...Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil...” (Q.S. al-Nahl [16]: 90)¹⁰⁷

Allah swt., menyebutkan bahwa Dia memerintahkan kepada hamba-Nya untuk berlaku adil, yakni pertengahan seimbang.

¹⁰⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Mubin*, h. 38.

¹⁰⁵ Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain I*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 122.

¹⁰⁶ *Ibid.*, h. 37.

¹⁰⁷ *Ibid.*, h. 277.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٦٥﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S al-T{ala>q [65]: 7)¹⁰⁸

Ayat ini menjelaskan kepada para suami untuk memberikan nafkah kepada isteri yang telah ditalak, dan kepada isteri yang sedang menyusukan menurut kemampuannya. Dan orang yang dibatasi dalam artian disempitkan resekinya hendaknya memberi nafkah dari apa yang didatangkan kepadanya yaitu dari rezeki yang telah diberikan kepadanya. Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S al-Ru>m [30]: 21)¹⁰⁹

Ayat ini menerangkan adanya tanda-tanda kebesaran Ilahi pada diri manusia yaitu Allah swt., telah menciptakan pasangan untuk setiap manusia yang mana hal itu bertujuan agar manusia dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.¹¹⁰ Kemudian di akhir

¹⁰⁸ Ibid., h. 559.

¹⁰⁹ Ibid., h.406.

¹¹⁰ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah, 2014), h.42.

ayat di atas, Allah *swt.*, menegaskan bahwa hal itu merupakan tanda–tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang mau berfikir.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, Khairuddin Nasution mengungkapkan, minimal ada 5 prinsip perkawinan:

- a. Prinsip musyawarah dan demokrasi;
- b. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam kehidupan keluarga;
- c. Prinsip menghindari kekerasan;
- d. Prinsip bahwa hubungan suami dan istri adalah sebagai sebagai partner;
- e. Prinsip keadilan.¹¹¹

Selain 5 prinsip tersebut, masih ada prinsip lain, di antaranya:

- a. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan khitbah (peminangan) terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak;
- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan;
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri;
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tenteram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya;
- e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, di mana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.¹¹²

Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana termaktub di dalam penjelasan umumnya, sebagai berikut:

¹¹¹ Ahmad Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemia, 2005), h. 56

¹¹² *Ibid.*

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.¹¹³
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.¹¹⁴
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari satu. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.¹¹⁵
- d. Undang-undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, maka Undang-Undang Perkawinan

¹¹³ Penjelasan Umum UU No 1 Tahun 1974, butir 4.a

¹¹⁴ Penjelasan Umum UU No 1 Tahun 1974, butir 4.b

¹¹⁵ Penjelasan Umum UU No 1 Tahun 1974, butir 4.c

menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita ialah 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi wanita.¹¹⁶

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.¹¹⁷ Untuk melakukan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan non Islam.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri¹¹⁸

Jika dibandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengandung 7 asas kaidah hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
- b. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang;
- c. Asas monogami terbuka;
- d. Asas calon suami istri telah siap jiwa raganya dapat melaksanakan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Sehingga tidak berfikir kepada perceraian;

¹¹⁶ Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 1974, butir 4.d

¹¹⁷ Penjelasan Umum UU No 1 Tahun 1974, butir 4.e

¹¹⁸ Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 1974, butir 4.f

- e. Asas mempersulit terjadinya perceraian;
- f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri baik dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat;
- g. Asas pencatatan perkawinan.¹¹⁹

B. Kafa'ah dalam Perkawinan

1. Pengertian Kafa'ah

Kafa'ah berasal dari kata (كفيء) di artikan sebagai setara. Menurut bahasa dapat diartikan sebagai setaraf, seimbang atau keserasian/kesesuaian, serupa sedrajad atau sebanding. Menurut istilah hukum Islam, kafa'ah atau kufu' dalam perkawinan diartikan sebagai keseimbangan dan keserasihan antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.¹²⁰

Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafa'ah* diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan istri, dari segi kedudukan (*hasab*), agama (*di>n*), keturunan (*nasab*) dan sebagainya. Sedangkan dalam istilah *fuqaha'*, *kafa'ah* didefinisikan dengan kesamaan di dalam hal-hal kemasyarakatan, yang dengan itu diharapkan akan tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga kelak, dan akan mampu menyingkirkan kesusahan.¹²¹

Para ulama dan cendekiawan menekankan perlunya kesetaraan dalam membina rumah tangga. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang aspek-aspek kesetaraan itu. Dahulu banyak ulama menekankan perlunya kesetaraan dalam garis keturunan di samping dalam tingkat sosial, ekonomi, akhlak, dan tentu saja dalam agama.¹²² Kufu' diukur ketika berlangsungnya akad nikah. Jika selesai akad nikah terjadi kekurangan-kekurangan, maka

¹¹⁹ Ahmad Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, h. 59.

¹²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Perdana Media Group, 2012), h. 96

¹²¹ Ahmad Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, h. 225.

¹²² M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), h. 347.

hal itu tidaklah mengganggu dan tidak pula membatalkan apa yang sudah terjadi itu sedikitpun, serta tidak mempengaruhi hukum akad nikahnya.¹²³

Perkawinan atau pernikahan merupakan jalan untuk membentuk rumah tangga. James H.S. Bossard menghubungkan perkawinan itu dengan status orang yang melakukannya. Menurutnya ada berbagai tujuan sehingga orang melakukan pernikahan untuk membentuk rumah tangga. Tujuan pertama menurut beliau ialah bahwa pernikahan itu menghasilkan satu status yang lebih besar dan tinggi dalam keluarga. Sedangkan didalam masyarakat, pernikahan meningkatkan status di tengah kelompok dan masyarakat.¹²⁴

Jadi kafa'ah adalah keseimbangan, dalam perkawinan kafa'ah dapat diartikan sebagai seimbangnyanya antara calon suami dan istri meliputi keyakinan atau agama, keislaman atau tingkat kepahaman dalam Islam, nasab atau keturunan, tingkat pendidikan, pekerjaan atau tingkat ekonomi. Kafa'ah sendiri dianggap mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga.

2. Dasar Hukum Kafa'ah

Tujuan dari kafa'ah adalah untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak sekuflu (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga.¹²⁵ Landasan keserasian dalam pernikahan ialah:

الْخَيْثُ لِلْخَيْثِ وَالْخَيْثُ لِلْخَيْثِ وَالْطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

¹²³ Sayyid Muhammad at-Tihâmi Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh: M. Thalib, Juz 7, 1987, h. 51

¹²⁴ Bugaran Antonius Simanjuntak, *Harmonius Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h. 3-4.

¹²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 96

Artinya: "Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)." (QS. al-Nu>r ayat 26)¹²⁶

Ayat ini menunjukkan kesucian 'Aisyah *r.a.*, dan S{afwan dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Rasulullah adalah orang yang paling baik, maka pastilah wanita yang baik pula yang menjadi istri beliau. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *kafa'ah*. *Jumhur ulama'* termasuk Imam Malik, Imam al-Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad dalam satu riwayatnya berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak termasuk syarat sah pernikahan sehingga pernikahan antara orang yang tidak sekufu akan tetap dianggap memiliki legalitas hukum. *Kafa'ah* dipandang hanya merupakan segi *afdl{oliyah* saja.¹²⁷ Pijakan dalil mereka merujuk pada ayat:

... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ...

Artinya: "...Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu...." (QS. al-Hujura>t ayat 13)¹²⁸

Kafa'ah merupakan hak yang diberikan kepada seorang wanita dan walinya, dan mereka diperbolehkan menggugurkan hak itu dengan melangsungkan suatu pernikahan antara pasangan yang tidak sekufu, apabila wanita tersebut dan walinya rida.¹²⁹

Dalil sahnya suatu pernikahan yang tidak sekufu adalah hadis yang mengisahkan tentang pernikahan antara Fatimah binti Qois dan Usamah, padahal Fatimah binti Qois adalah wanita merdeka dan keturunan dari suku

¹²⁶ Kementerian Agama RI, *al-Mubin (al-Qur'an dan Terjemahnya)*, h. 401.

¹²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 141

¹²⁸ Kementerian Agama RI, *al-Mubin (al-Qur'an dan Terjemahnya)*, h. 381.

¹²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, h. 141

Quraisy sedangkan Usamah adalah seorang budak.¹³⁰ Imam Muslim *r.a.*, meriwayatkan:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ، فَإِذَا حَلَلْتَ فَادْئِيبِي، قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُغْلُوكُ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ. فَكَرِهَتْهُ، ثُمَّ قَالَ: انْكِحِي أُسَامَةَ، فَنَكَحَتْهُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا، وَاعْتَبَطْتُ بِهِ.

Artinya: "Dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Fatimah binti Qais bahwa Abu Amru bin Hafsh telah menceraikannya dengan talak tiga, sedangkan dia jauh darinya, lantas dia mengutus seorang wakil kepadanya (Fatimah) dengan membawa gandum, (Fatimah) pun menolaknya. Maka (Wakil 'Amru) berkata; Demi Allah, kami tidak punya kewajiban apa-apa lagi kepadamu. Karena itu, Fatimah menemui Rasulullah saw., untuk menanyakan hal itu kepada beliau, beliau bersabda: "Memang, dia tidak wajib lagi memberikan nafkah." Sesudah itu, beliau menyuruhnya untuk menghabiskan masa iddahnya di rumah Ummu Syarik. Tetapi kemudian beliau bersabda: "Dia adalah wanita yang sering dikunjungi oleh para sahabatku, oleh karena itu, tunggulah masa iddahmu di rumah Ibnu Ummi Maktum, sebab dia adalah laki-laki yang buta, kamu bebas menaruh pakaianmu di sana, jika kamu telah halal (selesai masa iddah), beritahukanlah kepadaku." Dia (Fatimah) berkata; Setelah masa iddahku selesai, kuberitahukan hal itu kepada beliau bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Al Jahm telah melamarku, lantas Rasulullah saw., bersabda: "Abu Jahm adalah orang yang tidak pernah meninggalkan tongkatnya dari lehernya (suka memukul), sedangkan Mu'awiyah adalah orang yang miskin, tidak memiliki harta, karena itu nikahlah dengan Usamah bin Zaid." Namun saya tidak menyukainya, beliau tetap bersabda: "Nikahlah dengan Usamah." Lalu saya menikah dengan

¹³⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ad*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 124

Usamah, Allah telah memberikan limpahan kebaikan pada pernikahan itu hingga bahagia."¹³¹

Pertimbangan *kafa'ah* yang dimaksud dalam hal ini adalah dari pihak perempuan, maksudnya seorang wanita itu yang mempertimbangkan apakah lelaki yang akan menikah dengannya sekufu atau tidak.¹³² Sedangkan apabila derajat seorang wanita dibawah seorang lelaki itu tidaklah menjadi masalah.

Sebab semua dalil yang ada itu mengarah pada pihak lelaki dan sebagaimana diketahui semua wanita yang dinikahi Nabi *saw.*, derajatnya dibawah beliau, karena tak ada yang sederajat dengan beliau, hal ini bisa dilihat dari beragam latar belakang istri-istri Nabi. Selain itu kemuliaan seorang anak pun pada umumnya dinisbatkan pada ayahnya, jadi jika seorang lelaki yang berkedudukan tinggi menikah dengan wanita biasa itu bukanlah suatu aib. Rasulullah *saw.*, bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ، فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا، وَيُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ أَدَبَهَا، ثُمَّ يُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا فَلَهُ أَجْرَانِ. (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Abi Musa al-Asy'ari ra., bahwasanya Rasulullah *saw.*, bersabda: ada tiga macam orang yang akan memperoleh pahala 2 kali: seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan, kemudian ia mengajarnya dengan baik dan mendidik akhlaknya dengan baik lalu ia memerdekakannya dan menikahinya, maka ia mendapat 2 pahala. (HR. Bukhari)"¹³³

Ibnu Hazm berpendapat tidak ada ukuran *kufu'*. Dia berkata: "Semua orang Islam asal tidak berzina, berhak kawin dengan wanita muslimah asal tidak tergolong perempuan lacur. Dan semua orang Islam adalah bersaudara. Kendatipun ia anak seorang hitam yang tidak dikenal umpamannya, namun tak dapat diharamkan kawin dengan anak Khalifah Bani Hasyim. Meskipun

¹³¹ Imam Muslim, *Shohih Muslim*, (Pustaka al-Sunnah)

¹³² Abu Bakr 'Utsman, *I'annah al-Tolibin*, (Beirut: Da'r al-Kutub, 1995), h.554

¹³³ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shohih Bukhori*, (Beirut: Da'r Ibn Kat{ir, 256).

seorang muslim yang sangat fasik, asalkan tidak berzina ia adalah *kufu'* untuk wanita Islam yang fasik, asal bukan perempuan zina. Alasannya adalah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ...

Artinya: "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara." (QS. al-Hujurat ayat 10)¹³⁴

Rasulullah *saw.*, telah mengawinkan Zainab dengan Zaid bekasbudak beliau. Dan mengawinkan Miqdad dengan D{aba'ah binti Zubair bin Abdul Mut{alib. Kami berpendapat tentang laki-laki fasik, bagi golongan yang tidak setuju dengan pendapat kami mengatakan bahwa laki-laki fasik tidak boleh kawin kecuali dengan perempuan fasik saja. Dan bagi perempuan fasik tidak boleh dikawinkan kecuali dengan laki-laki fasik saja pula.¹³⁵

Bertolak belakang dari pendapat yang pertama, salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa *kafa'ah* itu termasuk syarat sah perkawinan. Ini berarti bahwa pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai yang tidak sekufu masih dianggap belum sah.¹³⁶ Mereka bertendensi dengan potongan hadis riwayat oleh al-Da'r Qut{ny yang dianggap lemah oleh kebanyakan ulama'. Hadis itu berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا مِنَ الْكَفَاءِ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ إِلَّا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ (رواه الدار قطنی)

Artinya: "Dari Ibn 'Umar bahwa Rasulullah *saw.*, bersabda: Janganlah kalian mengawinkan perempuan kecuali dari yang sekufu dan jangan mereka dikawinkan kecuali dari walinya. (HR. al-Da'r al-Qut{ny)"¹³⁷

¹³⁴ Kementerian Agama RI, *al-Mubin*, h. 379.

¹³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT al-Maa'rif, 1981), h. 36-37

¹³⁶ Imam 'Alauddin, *Badai'u S{ana'i*, (Beirut: Da'r al-Kutub, 1997), h. 577

¹³⁷ Kitab Sunan al-Da'r al-Qut{ny, Juz 3, h. 245.

Dalil disyari'atkannya kafa'ah dalam pernikahan adalah hadis:

تَخَيَّرُوا لِنُطْفِئُكُمْ، وَانكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَانكِحُوا إِلَيْهِمْ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Pilihlah (tempat) untuk mani kalian, dan nikahilah orang-orang yang sepadan, dan nikahkanlah (wanita) dengan orang-orang yang sepadan."¹³⁸

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، إِلَّا حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا) رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَأَوْ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ.

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a., bahwa Rasulullah saw., bersabda: "Bangsa Arab itu sama derajatnya satu sama lain dan kaum Mawali (bekas hamba yang telah dimerdekan) sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam." Riwayat Hakim dan dalam sanadnya ada kelemahan karena ada seorang perawi yang tidak diketahui namanya. Hadis munkar menurut Abu Hatim."¹³⁹

Meskipun kafa'ah masih dalam ruang lingkup keutamaan dan bukan merupakan salah satu syarat yang menentukan keabsahan nikah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tetap mengakui kafa'ah dengan dasar dan ketentuan masing-masing.

3. Tujuan kafaah

Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafa'ah hanyalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuaiakan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu, boleh dibatalkan.¹⁴⁰ Beberapa tujuan kafa'ah dalam pernikahan antara lain:

¹³⁸ Sunan Ibnu Majah, No.1968, *Mustadrok Lil-hakim*, No.2687, Sunan Da>r Qut{ni, No.3788 dan Sunan Kubro Lil-Baihaqi, No.13758

¹³⁹ Al-Hafi>z Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Mara>m*, (Mekah: Daru>l Ulum, 1478 H), h. 209.

¹⁴⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012), h. 97.

- a. *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.¹⁴¹
- b. *Kafa'ah* merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan. Islam telah memberikan hak talak kepada pihak laki-laki secara mutlak. Namun oleh sebagian laki-laki yang kurang bertanggung jawab, hak talak yang dimilikinya dieksploitir dan disalah gunakan sedemikian rupa untuk berbuat seenaknya terhadap perempuan. Sebagai solusi untuk mengantisipasi hal tersebut, jauh sebelum proses pernikahan berjalan, Islam telah memberikan hak *kafa'ah* terhadap perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pihak perempuan bisa berusaha selektif mungkin dalam memilih calon suaminya. Target paling minimal adalah perempuan bisa memilih calon suami yang benar-benar paham akan konsep talak, dan bertanggung jawab atas kepemilikan hak talak yang ada di tangannya.
- c. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya. Konsekuensi dari relasi imam-makmum ini sangat menuntut kesadaran ketaatan dan kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya. Hal ini hanya akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada satu level di atas istrinya, atau sekurang-kurangnya sejajar. Seorang istri bisa saja tidak kehilangan totalitas ketaatan kepada suaminya, meski (secara pendidikan dan kekayaan misalnya) dia lebih tinggi dari suaminya. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Seorang perempuan biasaakan terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih. Sebaliknya, citra negatif suami akan

¹⁴¹ Sayyid Muhammad al-Tihâmi Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh: M.Thalib, Juz 7, 1987, h. 36.

menjadi kredit kurang bagi nama, status sosial, dan kehidupan keagamaan seorang istri.¹⁴²

4. Pendapat Ulama Tentang Kafa'ah dalam Perkawinan

Mayoritas Ulama sepakat menempatkan *diyanah* (agama) sebagai kriteria kafa'ah. Konsensus itu didasarkan pada surat al-Sajadah ayat 18:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: "Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama." (QS.al-Sajadah ayat 18)¹⁴³

Ayat yang menerangkan mengenai kadar kemuliaan seseorang hanyalah ditinjau dari sisi ketaqwaannya. Tetapi dalam ketentuan lain para ulama' berbeda persepsi dalam menentukan kriteria yang digunakan dalam *kafa'ah*. Berikut pendapat dari para imam mazhab:

a. Menurut Ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa dasar *kafa'ah* adalah:

1) Nasab

Yaitu keturunan atau kebangsaan. Orang Arab adalah kufu' antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy lainnya. Karena itu orang yang bukan Arab tidak sekufu' dengan perempuan Arab. Orang Arab tetapi bukan dari golongan Quraisy, tidak sekufu' dengan/ bagi perempuan Quraisy lainnya.

2) Islam

Yaitu silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam. Dengan Islam maka orang *kufu'* dengan yang lain. Ini berlaku bagi orang-orang bukan Arab. Adapun di kalangan bangsa Arab tidak berlaku. Sebab mereka ini merasa sekufu' dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak akan berharga dengan Islam.

Adapun diluar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsa-bangsa lain, mereka merasa dirinya terangkat menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan muslimah yang ayah dan neneknya

¹⁴² Ibid.

¹⁴³ Kementerian Agama RI, *al-Mubin*, h. 465.

beragama Islam, tidak *kufu'* dengan laki-laki muslim yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam.¹⁴⁴

3) *Hirfah*;

Dimaksud dengan pekerjaan adalah berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik perusahaan maupun yang lainnya.¹⁴⁵ Seorang perempuan dan keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak *kufu'* dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatannya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab ada kalanya suatu pekerjaan tidak terhormat dianggap terhormat pada tempat yang lain.

4) *Huriyyah* (Kemerdekaan dirinya)

Budak laki-laki tidak *kufu'* dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak *kufu'* dengan perempuan yang merdeka dari asal. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak *kufu'* dengan perempuan yang neneknya tidak pernah ada yang jadi budak. Sebab perempuan merdeka bila dikawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula bila dikawin oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.¹⁴⁶

5) *Diyanah*;

Yaitu tingkat kualitas keagamaan dalam Islam. Karena keagamaan merupakan suatu unsur yang harus dibanggakan melebihi unsur kedudukan, harta benda, nasab dan semua segi kehidupan lainnya.¹⁴⁷ Abu Yusuf berpendapat: seorang laki-laki yang ayahnya Islam sudah

¹⁴⁴ Al-Gamrawi, *al-Sira>d al-Wahhaj*, (Libanon: Da>r al-Ma'rifah, t.t.), h. 359

¹⁴⁵ Al-Ramli, *Niha>yah al-Muhta>j*, VI, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1967), h. 258

¹⁴⁶ Al-Gamrawi, *al-Sira>d al-Wahhaj*, h. 369

¹⁴⁷ Muhammad Yusuf Musa, *Ahka>m al-Ahwa>l al-Syakhsiyyah fi> al-Isla*, (Mesir: Da>r al-Kutub al Arabi), 1376 H/1956 M, h. 144

dianggap *kufu'* dengan perempuan yang ayah dan neneknya Islam. Karena untuk mengenal laki-laki cukup hanya dikenal ayahnya saja.

6) Kekayaan

Ulama Syafi'iyah berkata bahwa kemampuan laki-laki fakir dalam membelanjai isterinya adalah di bawah ukuran laki-laki kaya. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran *kufu'* karena kekayaan itu sifatnya timbul tenggelam dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.¹⁴⁸

b. Menurut Ulama Malikiyah, menyatakan bahwa dasar *kafa'ah* adalah:

1) *Diyanah*

Dalam hal ini kedua calon mempelai harus beragama Islam dan tidak fasik.¹⁴⁹

2) Terbebas dari cacat fisik

Salah satu syarat *kufu'* ialah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang menyolok, ia tidak *kufu'* dengan perempuan yang sehat dan normal. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, buta, kusta atau lepra.¹⁵⁰ Di antara kecacatan-kecacatan nikah adalah:

- a) *Rataq* (Lubang kemaluan tertutup daging)
- b) *Qaran* (Lubang kemaluan tertutup tulang)
- c) *Jabb* (Kemaluan putus)
- d) *Unnah* (Impoten / kemaluan tidak bisa tegang)
- e) *Bakhar* (Mulut berbau busuk)
- f) *Sunan* (Keringat berbau busuk).¹⁵¹

¹⁴⁸ Abdur Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Maz{ahib al-Arba'ah*, (Lebanon: Da>r al-Kutub, 2010), h. 732

¹⁴⁹ *Ibid.*, h. 734

¹⁵⁰ Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Maz{ahib al-Arba'ah*, h. 58

¹⁵¹ *Ibid.*

c. Menurut ulama Syafi'iyah, menyatakan bahwa dasar *kafa'ah* adalah:

1) Nasab

Tidaklah dinamakan sekufu bila pernikahan orang bangsawan Arab dengan rakyat jelata atau sebaliknya.

2) *Diyanah*

Tidaklah sekufu apabila orang Islam menikah dengan orang yang bukan Islam. Sepatutnya perempuan sederajat dengan laki-laki untuk menjaga kehormatan dan kesuciannya. Maka perempuan yang baik sederajat dengan laki-laki yang baik dan tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik (pezina, pejudi, pemabuk, dan sebagainya). Perempuan yang fasik sederajat dengan laki-laki yang fasik. Perempuan pezina sederajat dengan laki-laki pezina.¹⁵²

3) Kemerdekaan dirinya

Tidaklah sekufu bagi mereka yang merdeka menikah dengan budak.

4) *Hirfah*.

Laki-laki yang mata pencahariannya rendah, seperti tukang sapu jalan raya, tukang jaga pintu dan sebagainya tidak sederajat dengan perempuan yang pekerjaan ayahnya lebih mulia, seperti tukang jahit atau tukang listrik dan sebagainya tidak sederajat dengan perempuan anak saudagar. Dan laki-laki saudagar tidak sederajat dengan perempuan anak ulama atau anak hakim.¹⁵³

Adapun mengenai kekayaan tidak termasuk dalam kriteria pernikahan. Karena itu, laki-laki miskin sederajat dengan perempuan yang kaya. Menurut Imam al-Syafi'i pula, kriteria pernikahan itu diperhitungkan dari pihak perempuan. Adapun laki-laki, ia boleh menikahi perempuan yang tidak sederajat dengan dia, meskipun kepada pembantu atau perempuan budak. Demikian menurut Imam al-Syafi'i.

¹⁵² *Ibid.*, h. 734

¹⁵³ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 262

d. Menurut Ulama Hanabilah menyatakan bahwa yang menjadi dasar kafa'ah adalah:

- 1) *Diyanah* (agama)
- 2) *Hirfah* (profesi)
- 3) Kekayaan
- 4) Kemerdekaan diri, dan
- 5) Nasab¹⁵⁴

Mazhab Hambali memiliki pendapat yang sama dengan mazhab Syafi'i, hanya ada tambahan satu hal, yaitu tentang kekayaan. Menurut Imam Hambali, laki-laki miskin tidak sederajat dengan perempuan yang kaya.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa masalah *kafa'ah* dalam perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama baik mengenai eksistensi maupun kriterianya. Masing-masing ulama mempunyai batasan yang berbeda mengenai masalah ini. Masalah ketentuan *kafa'ah* yang dapat kita temui dari penjelasan kriteria kafa'ah di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Segi Agama.

Semua ulama mengakui agama sebagai salah satu unsur *kafa'ah* yang paling esensial.¹⁵⁵ Penempatan agama sebagai unsur *kafa'ah* tidak ada perselisihan dikalangan ulama. Agama juga dapat diartikan dengan kebaikan, istiqomah dan mengamalkan apa yang diwajibkan agama. Adakan ada seorang wanita solehah dari keluargayang kuat agamanya menikah dengan pria yang fasik, maka wali wanita tersebut mempunyai hak untuk menolak atau melarang bahkan menuntut *faskh*, karena agama merupakan suatu unsur yang harus dibanggakan melebihi unsur

¹⁵⁴ Abdur Rahman al-Jazairi, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, h. 735

¹⁵⁵ Iffatin Nur, *Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) dalam al-Qur'an dan Hadis*, h. 420

kedudukan, harta benda, nasab dan semua segi kehidupan lainnya.¹⁵⁶

Dasar penetapan segi agama ini adalah:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: "Maka apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama." (QS. al-Sajadah ayat 18)¹⁵⁷

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ.¹⁵⁸

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw., bersabda "Perempuan dikawini karena empat hal, karena hartanya, karena kedudukannya (martabatnya), karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah perempuan karena agamanya, maka kamu akan mendapat keberuntungan." (Muttafaq 'alaih bersama Imam tujuh)

b. Segi Nasab

Maksud nasab disini adalah asal usul atau keturunan seseorang yaitu keberadaan seseorang berkenaan dengan latar belakang keluarganya baik menyangkut kesukuan, kebudayaan maupun setatus sosialnya. Dalam unsur nasab ini terdapat dua golongan yaitu pertama golongan Ajam, kedua golongan Arab. Adapun golongan arab terbagi menjadi dua suku yaitu suku Quraisy dan selain Quraisy.¹⁵⁹

Dengan ditetapkannya nasab sebagai kriteria *kafa'ah*, maka orang Ajam dianggap tidak sekufu dengan orang Arab baik dari suku Quraisy maupun suku selain Quraisy. Orang Arab yang tidak berasal dari suku Quraisy dipandang tidak *kufu'* dengan orang Arab yang berasal dari suku

¹⁵⁶ Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi al-Islam*, (Mesir: Daar al-Kutub al-Arabi, 1376H/1956M), h. 144. Lihat juga. al-Sayyid Sabiq, *Fiqhal-Sunnah*, (Bairut: Daar al-Kitab al-Arabiah, tt), II, h. 126

¹⁵⁷ Kementerian Agama RI, *al-Mubin (al-Qur'an dan Terjemahnya)*, h. 461.

¹⁵⁸ al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Mekah: Daar al-Ulu, 1478H), h. 201.

¹⁵⁹ Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah*, h. 39

Quraisy. Selain itu, untuk orang Arab yang berasal dari keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib hanya dapat sekufu dengan seseorang yang berasal dari keturunan yang sama, tidak yang lainnya.¹⁶⁰

c. Segi Kemerdekaan.

Kriteria tentang kemerdekaan ini sangat erat kaitannya dengan masalah perbudakan. Perbudakan diartikan dengan kurangnya kebebasan. Budak adalah orang yang berada di bawah kepemilikan orang lain. Ia tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri. Adapun maksud kemerdekaan sebagai kriteria *kafa'ah* adalah bahwa seorang budak laki-laki tidak *kufu'* dengan perempuan yang merdeka. Demikian juga seorang budak laki-laki tidak *kufu'* dengan perempuan yang merdeka sejak lahir.¹⁶¹ Kemerdekaan juga dihubungkan dengan keadaan orang tuanya, sehingga seorang anak yang hanya ayahnya yang merdeka, tidak *kufu'* dengan orang yang kedua orang tuanya merdeka. Begitu pula seorang lelaki yang neneknya pernah menjadi budak, tidak sederajat dengan perempuan yang neneknya tidak pernah menjadi budak, sebab perempuan merdeka jika dikawinkan dengan laki-laki budak dipandang tercela. Sama halnya jika dikawinkan dengan laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.¹⁶²

d. Segi Pekerjaan.

Jadi apabila ada seorang wanita yang berasal dari kalangan orang yang mempunyai pekerjaan tetap dan terhormat, maka dianggap tidak sekufu dengan orang yang rendah penghasilannya. Sementara itu Al-Ramli berpendapat bahwa dalam pemberlakuan segi ini harus diperhatikan adat dan tradisi yang berlaku pada suatu tempat.¹⁶³

Sedangkan adat yang menjadi standar penentuan segi ini, adalah adat yang berlaku di mana wanita yang akan dinikahi berdomisili. Konsekuensinya, jika pekerjaan yang disuatu tempat dipandang

¹⁶⁰ *Ibid.*, h. 359

¹⁶¹ *Ibid.*, h. 369

¹⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 130

¹⁶³ Al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, h. 258

terhormat tapi di tempat si wanita dianggap rendah, maka pekerjaan tersebut dapat menghalangi terjadinya *kufu*’.

e. Segi Kekayaan.

Yang dimaksud kekayaan adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan manusia terdapat stratifikasi sosial, di antara mereka ada yang kaya dan ada yang miskin. Walaupun kualitas seseorang terletak pada dirinya sendiri dan amalnya, namun kebanyakan manusia merasa bangga dengan nasab dan bertumpuknya harta. Oleh karena itu, sebagian fuqaha memandang perlu memasukkan unsur kekayaan sebagai faktor *kafa’ah* dalam perkawinan. Tetapi menurut Abu Yusuf, selama seorang suami mampu memberikan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan nafkah dari satu hari ke hari berikutnya tanpa harus membayar mahar, maka ia dianggap termasuk ke dalam kelompok yang mempunyai *kafa’ah*. Abu Yusuf beralasan bahwa kemampuan membayar nafkah itulah yang lebih penting untuk menjalani kehidupan rumah tangga kelak. Sementara mahar dapat dibayar oleh siapa saja di antara keluarganya yang mempunyai kemampuan misalnya bapak ataupun kakek.¹⁶⁴ Secara umum dasar penetapan segi kekayaan ini adalah beberapa hadis berikut ini:

قال النبي صلى الله عليه وسلم "الحَسْبُ الْمَالُ وَالْكَرْمُ التَّقْوَى" (رواه سمرة)

Artinya: “Nabi saw., bersabda: Kedudukan adalah dengan harta sedangkan kedermawanan adalah *ketaqwaan*”. (HR. Samurah)¹⁶⁵

قال النبي صلى الله عليه وسلم "إِنَّ أَحْسَابَ النَّاسِ بَيْنَهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا هَذَا الْمَالُ" (رواه ابن حبان)

¹⁶⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Aq{d al-Zawa>j wa A>saruh*, h. 188

¹⁶⁵ Al-Syaukani, *Nail al-Autar, Kitab al-Kafa’ah*, IV, h. 138. Hadis Riwayat Samurah dengan sanad sahih.

Artinya: "Nabi saw., bersabda: Sesungguhnya manusia yang dipandang terhormat diantara mereka di dunia ini adalah yang memiliki harta." (HR. Ibn Hibban).¹⁶⁶

f. Segi Bebas dari Cacat.

Cacat yang dimaksudkan adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntut *faskh*. Karena orang cacat dianggap tidak se-*kufu* dengan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, kusta atau lepra.¹⁶⁷

Sebagai kriteria *kafa'ah*, segi ini hanya diakui oleh ulama Malikiyah tapi dikalangan sahabat Imam Syafi'i ada juga yang mengakuinya. Sementara dalam Mazhab Hanafi maupun Hambali, keberadaan cacat tersebut tidak menghalangi *kufu*'nya seseorang.¹⁶⁸

Walaupun cacat tersebut dapat menghalangi *kufu*' seseorang, namun tidak berarti dapat membatalkan perkawinan. Karena keabsahan bebas dari cacat sebagai kriteria *kafa'ah* hanya diakui manakala pihak wanita tidak menerima. Akan tetapi jika terjadi kasus penipuan atau pengingkaran misalnya sebelum perkawinan dikatakan orang tersebut sehat tapi ternyata memiliki cacat maka kenyataan tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut *faskh*.¹⁶⁹

Di atas telah disebutkan beberapa kriteria yang ditetapkan oleh Fuqaha. Kriteria tersebut merupakan syarat yang ideal sebagai jaminan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berumah tangga. Namun keadaan manusia itu tidak selalu sempurna, tetapi selalu saja ada kekurangannya, sehingga jarang sekali didapati seorang calon suami atau calon isteri yang memiliki kriteria baik secara menyeluruh. Apabila faktor-faktor tersebut tidak dimiliki dan didapati seluruhnya, maka yang harus

¹⁶⁶ Syekh Ahmad Syamsuddin, *Kitab Sunan Ibn Majah*, (Libanon: Da'r al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), No. Hadis 3418.

¹⁶⁷ Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mad'ahib al-Arba'ah*, h. 58

¹⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 132

¹⁶⁹ Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Maz'ahib al-Arba'ah*, h. 60

diutamakan adalah faktor agama. Sebab perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama mempunyai kemungkinan kegagalan yang lebih besar daripada yang seagama.¹⁷⁰

Sebagaimana pendapat M. Quraissy Syihab di dalam bukunya, *Wawasan al-Qur'an*, bahwa perbedaan tingkat pendidikan, budaya dan agama antara suami istri seringkali memicu konflik yang mengarah pada kegagalan.¹⁷¹ Keagamaan merupakan salah satu pertimbangan yang wajib ditaati dalam pernikahan. Bahkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 disebutkan:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”.

Dalam sisi yang lain, memang faktor agama juga merupakan satu-satunya yang menjadi kesepakatan dan titik temu dari pendapat tentang kriteria *kafa'ah* oleh semua Mazhab. Penentuan *kafa'ah* dari segi agama juga bisa dikaitkan dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Tujuan pernikahan menurut Islam secara garis besarnya adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata dan untuk mendapatkan keturunan.

Di samping itu, pernikahan menurut Islam juga bertujuan memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan, serta membangun masa depan individu, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik. Dalam Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), tujuan perkawinan dalam Pasal 1 sebagai rangkaian dari pengertian perkawinan, yakni:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*¹⁷²

¹⁷⁰ Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Cet. II, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), h. 101

¹⁷¹ M. Quraissy Syihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 197

¹⁷² A. Zuhdi Muhdor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, UU No 1/1974 (UU Perkawinan), UU No 7/1989 (UU Peradilan Agama, dan KHI*, Cet. II (Bandung: al-Bayan, 1995), h. 15-17

Dengan demikian, jika dilihat dari tujuan pernikahan tersebut, *kafa'ah* dalam pernikahan dapat mendukung tercapainya tujuan pernikahan. Latar belakang diterapkannya konsep *kafa'ah* dalam pernikahan bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis yang dapat melanda kehidupan rumah tangga.

Tujuan pernikahan dapat tercapai apabila kerjasama antara suami dan isteri berjalan dengan baik sehingga tercipta suasana damai, aman dan sejahtera. Tercapainya tujuan pernikahan memang tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi pendukung dalam menentukan pasangan. Dan faktor agama serta akhlaklah yang lebih penting dan harus diutamakan.¹⁷³

5. Kriteria atau Batasan Menurut Undang-Undang

Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memang tidak secara terang-terangan menyebutkan *kafa'ah* namun nilai kehati-hatian para pihak memperlihatkan bahwa unsur kesamaan (*kafa'ah*) amat diperlukan. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab X Pasal 61 menerangkan bahwa tidak sekufu kecuali perbedaan agama atau *ikhtilaf al-din* tidak dapat menjadi alasan untuk mencegah perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah yang di terjemahkan oleh Thalib berpendapat bahwa dalam hal perkawinan tidak hanya sebatas pada sikap jujur dan budi luhur, diluar sikap jujur dan budi luhur, wajib dipertimbangkan.¹⁷⁴

Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa *kafa'ah* selain dalam hal agama tidak menyebabkan sah atau tidaknya suatu perkawinan, namun

¹⁷³ M. Fauzil Adhim dan M. Nazif Masykur, *Di Ambang Pernikahan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 78-82

¹⁷⁴ Sayyid Muhammad at-Tihâmi Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh: M.Thalib, Juz 7, 1987, h. 41-42

kafa'ah dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari ketimpangan dan ketidakcocokan serta untuk mencapai keserasihan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

C. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, kata keluarga dan kata sakinah. Keluarga sakinah adalah kelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak atau suami istri dan anak-anaknya.¹⁷⁵

Definisi lain mengatakan bahwa keluarga sakinah adalah sekelompok kecil dari masyarakat yang dimiliki sistem-sistem yang mengatur dan disiplin dalam melakukan seks, memelihara dan mendidik anak, mengadakan hubungan pembebasan tata cara minang dan perkawinan juga ketentuan mana yang boleh dan mana yang haram.

Kata keluarga dipakai dengan pengertian orang seisi rumah atau masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dan anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan nasab. Adapun sakinah berasal dari kata *sakana*, *yaskunu*, *saki>nan* yang berarti tenang, damai dan aman.¹⁷⁶

Definisi lain menyatakan bahwa sakinah adalah tenang, tentram dan tidak gelisah. Departemen Agama mendefinisikan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah mampu memenuhi hajat spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.¹⁷⁷

¹⁷⁵ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2003), h. 7.

¹⁷⁶ Jamaluddin Muhammad, Juz II, h. 378.

¹⁷⁷ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jawa Timur: Kantor Wilayah Kementerian Agama, 2010), h. 142.

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang kata sakinah antara lain terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 248, yaitu:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن
كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya: "Dan nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya tanda ia akan menjadikan raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman." (QS. al-Baqarah ayat 248)¹⁷⁸

Berdasarkan ayat di atas, kata sakinah diartikan ketenangan dan ketentraman lahir dan batin, karena terwujudnya keluarga yang ditandai oleh kasih sayang antara suami dan istri serta anak. Kemudian terwujudnya keluarga sakinah itu selalu ditandai dengan perasaan aman, tentram dan bahagia. Di dalam keluarga sakinah, setiap anggotanya merasa dalam suasana tentram, damai, aman, bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir batin adalah bebas dari kemiskinan iman, rasa takut akan kehidupan dunia akhir, mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam keluarga dan masyarakat. Di samping itu, suasana sakinah memberikan kemungkinan pada setiap anggotanya untuk dapat mengembangkan dasar kemampuan fitrah kemanusiaan yaitu fitrah manusia sebagai hambanya yang baik.¹⁷⁹

Pada dasarnya keluarga sakinah adalah keluarga yang mendatangkan cinta kasih mawaddah warahmah dalam rumah tangga, sesuai dengan firman Allah dalam surat QS. al-Ru>m ayat 21, yaitu:

¹⁷⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Mubin (al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 40.

¹⁷⁹ Pemimpin pusat Muhammadiyah, 1989, h. 1.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istreri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. al-Ru>m ayat 21)¹⁸⁰

Berdasarkan ayat diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Allah swt., menciptakan manusia untuk kebutuhan jasmani dan rohani dan untuk memelihara serta meneruskan keturunan dan menjalani hidup di dunia. Dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani yang mendatangkan keseimbangan di antara dunia dan akhirat.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang terpenuhi segala kebutuhan baik kebutuhan spritual maupun material, keluarga yang aman, damai dan sejahtera dalam suasana keimanan dan ketaqwaan yang tercermin disetiap anggota keluarganya. Keluarga yang selalu dihiasi amal shaleh, akhlak mulia serta menjadi suri tauladan bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah, maka di dalam petunjuk pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah sebagaimana keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999.¹⁸¹

2. Syarat Terciptanya Keluarga Sakinah

Untuk mewujudkan keluarga sakinah bukanlah hal yang mudah kalau tidak dilaksanakan dengan baik. Dimana keluarga senantiasa harus dilandasi adanya kasih sayang, setiap anggota keluarga memahami akan kewajibannya masing-masing dalam keluarga itu sendiri.¹⁸²

¹⁸⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Mubin (al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h..406.

¹⁸¹ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 145.

¹⁸² *Ibid.*, h. 164.

Enam program keluarga sakinah menurut Dadang Hawari adalah sebagai berikut:

- a. Ciptakan kehidupan beragam dalam keluarga.
- b. Waktu bersama keluarga harus ada.
- c. Dalam interaksi segitiga itu keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga.
- d. Harus saling menghormati dan menghargai dalam interaksi ayah, ibu dan anak-anak.
- e. Keluarga sebagai unit terdiri dari ayah, ibu dan anak yang harus kuat dan erat jangan longgar dan rapuh.
- f. Jika keluarga anda mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan, maka prioritas utama adalah kebutuhan keluarga.¹⁸³

Demikian juga yang dikatakan oleh Safeni bahwa syarat utama terjalannya keharmonisan dalam keluarga adanya keseimbangan antara jasmani dan rohani, dimana kebutuhan jasmani terpenuhi seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan menambah penghasilan keluarga. Adapun kebutuhan rohani yaitu kita sebagai makhluk ciptaan Allah harus bersyukur kepadanya dengan mendirikan shalat, membayar zakat dan sebagainya. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mempunyai kasih sayang.¹⁸⁴

Menurut Hasan Basri, syarat-syarat untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

Seseorang dalam mempersiapkan keluarga harus siap dari psikologi kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak-anak muda dan remaja dalam masa perkembangan dan pertumbuhan. Harapan terasa meluap-luap dengan syarat, jika badan sehat dan beberapa kondisi lain yang mendukung dimiliki dijalur kehidupan yang sedang dilalui.¹⁸⁵

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ *Ibid.*, h. 165.

¹⁸⁵ *Ibid.*

Selain dari psikologi, maka keimanan perlu dimiliki karena manusia hidup di dunia ini pada umumnya ingin bahagia dan sejahtera lahir dan batin bermacam-macam ikhtiar dilakukan baik siang dan malam semuanya bertujuan meraih kehidupan yang lebih baik. Beriman kepada Allah *swt.*, akan menumbuhkan kesadaran perlunya bersyukur akan nikmat dan anugrah-Nya yang telah dilimpahkannya kepada manusia dalam jumlah yang tidak terhingga dan tidak mampu kita menghitung-hitung akan jumlahnya.¹⁸⁶

Rasulullah memberikan persyaratan-persyaratan kepada manusia yang akan membina keluarga baru yaitu calon pasangan suami dan istri, di antaranya yaitu:

- a. Calon pasangan suami dan istri hendaknya sekufu, baik rupa, keturunan, kekayaan dan agama. Namun syarat yang utama adalah keduanya harus seagama dan taat beragama. Memang laki-laki yang beragama Islam boleh menikahi wanita-wanita ahli kitab, namun kebolehan itu dalam rangka dakwah namun tetap diharuskan wanita tersebut harus masuk Islam.
- b. Seagama dan taat beragama menjadi syarat utama bagi pasangan calon pembina keluarga sakinah, karena syarat inilah yang betul-betul akan menjadi sumber ketenangan dalam rumah tangganya. Agama juga dapat menjadi pendorong semangat dalam melaksanakan kewajiban masing-masing yang dapat mencegah keruntuhan rumah tangga, kepatuhan terhadap agama dapat berfungsi sebagai pupuk yang menyuburkan perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka.¹⁸⁷

3. Menciptakan Keluarga Sakinah

Rumah tangga adalah sesuatu yang berkenaan dengan keluarga. Sedangkan sakinah adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi menciptakan rumah tangga sakinah, yaitu menciptakan

¹⁸⁶ *Ibid.*, h.166.

¹⁸⁷ *Ibid.*

rumah tangga (sesuatu yang berkenaan dengan keluarga) yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.

Sesungguhnya membangun rumah tangga itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa beratnya, dimulai dari pemancangan pondasi aqiqah dan pilar-pilar akhlak. Sebelum menciptakan rumah tangga yang sakinah, seorang suami harus memiliki kepribadian suami yang shaleh, agar suami sukses membantu keluarga sakinah berhubungan dengan itu, Kasmuri Selamat mengemukakan beberapa kepribadian suami shaleh yaitu sebagai berikut:

a. Berpasangan teguh kepada syariat Allah

Laki-laki yang shaleh adalah seorang laki-laki yang senantiasa berpegang teguh kepada syariat Allah dalam segala urusan kehidupan. Ia tunaikan kewajiban yang Allah telah tentukan keduanya. Jika ia menjadi seorang suami, ia akan melaksanakan kewajiban terhadap keluarganya dengan penuh tanggung jawab, bersemangat, penuh perhatian serta berlapang dada.¹⁸⁸

b. Seimbang antara hak dan kewajiban

Dalam kehidupan sehari-hari sikapnya tidak tamak, tidak menuntut lebih banyak dari yang semestinya, bahkan ia menerima dengan rela terhadap kekurangan-kekurangan yang ada. Ia tidak pernah menyalahkan kewajibannya, kewajiban tersebut ia tunaikan sebelum menuntut haknya.

c. Berpedoman kepada petunjuk Rasulullah *saw*.

Laki-laki yang shaleh tentu akan membahagiakan istrinya. Dalam kehidupan berumah tangga ia senantiasa berpedoman kepada hadis Rasulullah *saw*., yang maksudnya:

¹⁸⁸ *Ibid.*

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا قَالَ وَفِي
الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Artinya: “Sesungguhnya mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah kalian yang baik terhadap istri-istri kalian. Abu Isa berkata, “Hadis semakna diriwayatkan dari Aisyah dan Ibn Abbas.” Dia menambahkan; “Hadis Abu Hurairah merupakan hadis hasan sahih”. (H.R. Timidzi).¹⁸⁹

Itulah kesaksian agung Rasulullah saw., bagi suami yang shaleh, kesaksian kebajikan yang diiringi dengan kesempurnaan iman serta akhlak yang mulia. Di samping itu ciri-ciri dari laki-laki shaleh yang membahagiakan kehidupan rumah tangga itu ialah:

- 1) Mendirikan rumah tangga semata-mata karena Allah swt.
- 2) Melayani dan menasehati Istri dengan sebaik-baiknya.
- 3) Menjaga hati dan perasaan istri.
- 4) Senantiasa berpegangan rasa dan tidak menuntut sesuatu di luar kemampuan istri.
- 5) Bersabar dan menghindari memukul istri dengan pukulan yang memudaratkan.
- 6) Tidak mencaci istri dihadapan orang lain dan tidak memuji wanita lain di hadapannya.
- 7) Bersabar dan menerima kelemahan istri dengan hati yang terbuka, serta meyakini bahwa segala sesuatu yang dijadikan Allah swt., pasti terdapat hikmah yang tersembunyi dibalikinya.
- 8) Mengelakkan agar jangan terlalu mengikuti kemauan istri, karena ia akan melunturkan nama baik dan prestasi suami selaku pemimpin rumah tangga.
- 9) Memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak menurut kadar kemampuan.

¹⁸⁹ Al-Mundari, *al-Tarhib wa al-Tarhib*, Riwayat Abu Hurairah No. Hadis 358.

- 10) Menyediakan keperluan dan tempat tinggal yang layak untuk mereka.
- 11) Bertanggung jawab menidik akhlak istri dan anak-anak sesuai dengan kehendak Islam.
- 12) Senantiasa menjaga tentang keselamatan mereka.
- 13) Memberikan kasih sayang dan rela berkorban apa saja demi kepentingan dan kebahagiaan bersama.¹⁹⁰

Menciptakan rumah tangga sakinah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Membina sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, adalah dambaan dari setia suami istri yang berikrar dalam cinta dan kasih sayang. Semua orang Islam berharap dengan penuh perjuangan dan pengorbanan, agar mahligai rumah tangga yang dibangun dengan landasan cinta dan kasih sayang menjadi bagi penghuninya maupun generasi yang akan lahirkan.¹⁹¹

Namun, ternyata ketika bahtera itu mulai mengarungi lautan yang luas, seringkali kemudian menjadi keributan antara suami istri. Mereka berusaha menjadi nahkoda yang handal, dan bersikeras menunjukkan arah tujuan yang diarungi. Begitu banyak di antara kita yang merindukan rumah tangga menjadi suatu yang teramat indah, bahagia, penuh dengan pesona cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, kenyataan yang ada, kita saksikan deretan antrian orang-orang yang gagal dalam menciptakan rumah tangga bahagia. Hari demi harinya hanya diisi kecemasan, ketakutan, kekerasan, kegelisahan dan penderitaan. Bahkan tidak jarang diakhiri dengan kenistaan yang berujung dengan perceraian sehingga melahirkan penderitaan yang berkepanjangan, terutama bagi anak-anak yang dilahirkan. Ternyata merindukan rumah tangga sakinah harus benar-benar disertai dengan kesungguhan, yakni mengarahkan segala daya dan upaya dalam pengertian yang sebenarnya. Ahmad Sofyan mengatakan ada empat kiat minimal menuju keluarga yang sakinah yaitu sebagai berikut:

¹⁹⁰ *Ibid.*, h. 168-169.

¹⁹¹ *Ibid.*

- a. Jadikan rumah tangga sebagai pusat ketentraman batin dan ketenangan jiwa.

Keluarga atau rumah tangga sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggota-anggotanya sesuai dengan tujuan perkawinan.¹⁹² Sesungguhnya rumah tangga itu bisa dijadikan pusat ketenangan, ketentraman dan kenyamanan batin para penghuninya.¹⁹³ Ketika rumah mampu dijadikan sebagai pusat ketentraman batin dan ketenangan jiwa, maka anak-anak pun akan rindu berkumpul bersama dengan orang tuanya. Menciptakan rumah sebagai pelepas dahaga.

- b. Jadikan rumah tangga sebagai pusat ilmu

Rumah tangga yang ditingkatkan derajatnya oleh Allah *swt.*, Bukanlah rumah tangga yang dimiliki status sosial keduniawian. Tidak pula rumah tangga yang para penghuninya adalah penuh dengan deretan titel dan gelar. Bahkan justru hal seperti itu seringkali memisahkan kita dengan kebahagiaan batin dan ketentraman jiwa. Tidak jarang pula rumah tangga yang berlimpah dengan kekayaan justru membuat penghuninya di miskinakan oleh keinginan-keinginan, diperbudak dan dinistakan oleh apa yang dimilikinya. Hendaknya sesudah memantapkan niat kita kepada Allah untuk mengarungi bahtera rumah tangga, maka kekayaan yang harus dimiliki dalam berkeluarga adalah ilmu. Merawat dan mendidik anak merupakan tugas bersama suami istri. Hal ini dapat dipahami dari teks-teks al-Qur'an dan Hadis. Seperti yang terdapat dalam firman Allah *swt.*, QS. al-Tahrim ayat 6:

¹⁹² Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 4 Desember 2015, h. 808, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/210/358> (16 Juni 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

¹⁹³ Sri Mulyani, *Relasi Suami Istri dalam Islam*, h. 39.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنْفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. al-Tahrim ayat 6)¹⁹⁴

c. Jadikan rumah tangga sebagai pusat nasehat

Suami istri hendaknya mengetahui bahwa semakin hari semakin banyak yang harus dilakukan. Untuk itulah kita membutuhkan orang lain agar melengkapi kekurangan kita guna memperbaiki kesalahan kita.¹⁹⁵ Rumah tangga bahagia adalah rumah tangga yang dengan sadar menjadikan sikap saling menasehati, saling memperbaiki, serta saling mengoreksi dalam kebenaran dan kesabaran sebagai kekayaan yang berharga dalam rumah tangga. Suami yang baik adalah suami yang mau dinasehati oleh sang istri, begitupula sebaliknya. Karena keduanya tidaklah boleh merasa lebih baik dan lebih berjasa dalam membangun rumah tangga. Apabila sebuah rumah tangga mulai saling menasehati, maka rumah tangga tersebut bagaikan cermin, yang tentu cermin akan mampu membuat sebuah penampilan penghuninya menjadi lebih baik. Tidak ada koreksi yang paling aman selain koreksi dari keluarga kita sendiri.

d. Jadikan rumah tangga sebagai pusat kemudian

Hendaknya suami istri mampu menjadikan rumah tangga seperti cahaya matahari. Menerangi kegelapan, menumbuhkan bibit-bibit menyegarkan yang layu, selalu dinanti cahayanya dan membuat gembira bagi yang terkena pancaran cahayanya. Keluarga yang baik adalah keluarga yang bisa menjadi contoh kebaikan bagi keluarga yang lainnya.

¹⁹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Mubin (al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 560.

¹⁹⁵ Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri dalam Islam*, h. 54.

Sehingga tidak ada yang diucapkan selain kebaikan tentang keluarga yang telah dibangun. Demikianlah empat kiat menuju keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah yang hendaknya dilakukan oleh keluarga muslim di era modern ini. Karena betapa memilukan sekaligus memalukan jika ada keluarga muslim yang melakukan tindakan kekerasan rumah tangga seperti yang akhir-akhir ini terjadi.¹⁹⁶

4. Membangun Keluarga Sakinah

Dasar keadilan dan kesetaraan, semua manusia dipersaudarakan dalam tauhid. Sejarah mencatat, kehadiran Islam meruntuhkan fanatisme kesukuan masyarakat Arab yang membuat mereka terpecah belah dan saling menumpahkan darah. Perseteruan antara suku Aus dan Khazraj yang berlangsung turun-temurun, misalnya, luluh dan lebur bersamaan dengan masuknya tauhid ke dalam hati mereka. Tidak ada lagi perasaan lebih tinggi dan lebih mulia di antara mereka. Jika pada masa lalu kemuliaan diukur dengan kemenangan dalam persaingan dan peperangan antar suku, tauhid telah mengubah pandangan tentang arti kemuliaan itu.¹⁹⁷

Kemuliaan dalam tauhid adalah kemuliaan di mata Allah *swt.*, dan Rasul-Nya yang dicapai dengan ketakwaan. Oleh karena itu, persaingan yang mereka lakukan bukan lagi untuk meraih kemuliaan suku, melainkan untuk meraih predikat “paling bertakwa”. Namun, harus selalu diingat bahwa yang punya hak menilai siapa di antara manusia yang paling takwa hanya Allah *swt.*, semata, bukan manusia. Manusia hanya berlomba-lomba dalam kebaikan (*fastabiq al-khirat*), berkompetensi melakukan amal saleh sebanyak-banyaknya. Demikianlah mereka dipersatukan dan dipersaudarakan oleh satu tali yang jauh lebih kuat daripada tali kesukuan yang pernah mereka pegang, yakni tali Allah.¹⁹⁸

¹⁹⁶ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 169-171.

¹⁹⁷ Siti Musda Mulia, *Membangun Surga di Bumi (Kiat-kiat Membangun Kluarga Ideal dalam Islam)*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011), h. 32.

¹⁹⁸ *Ibid.*, h. 33.

Di samping mempersaudarakan suku, tauhid juga mempersaudarakan individu. Tercatat beberapa nama dari kelompok Muhajirin (orang yang ikut hijrah bersama Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah) yang dipersaudarakan dengan kelompok Anshar (penduduk asli Madinah), seperti Abdurrahman bin 'Auf dengan Sa'ad bin al-Rabi'. Persaudaraan itu berlangsung atas dasar saling menolong, menghargai dan menghormati.¹⁹⁹

Tidak kalah penting, tauhid juga mempersaudarakan laki-laki dan perempuan ibarat saudara kandung. Mereka tidak boleh saling menyakiti dan merendahkan. Mereka harus bekerjasama, saling menolong, dan bahu-membahu demi tercapainya cita-cita bersama.

Kehidupan dalam keluarga seharusnya dibangun di atas landasan tiga prinsip, yaitu persaudaraan, persamaan, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Ketiganya bermuara pada satu sungai, yaitu tauhid.

Kata saudara memiliki makna yang sangat dalam. Kata ini mengandung arti kesetaraan, kebersamaan, kasih sayang, penghormatan atas hak tiap orang, pembelaan atas orang-orang yang mengalami kezaliman, serta rasa senasib dan sepenanggungan. Persaudaraan juga menghapuskan semangat "keakuan" atau sikap individualistis, sehingga setiap orang yang bersaudara akan bergerak bersama dengan semangat dan jiwa "kekitaan" demi kemaslahatan bersama.²⁰⁰

Impelementasi prinsip tauhid dalam kehidupan masyarakat seperti dicontohkan Rasul sungguh membawa dampak positif dan konstruktif dalam kehidupan seluruh anggota masyarakat. Kalau dalam kehidupan masyarakat luas saja diperlukan prinsip tauhid, maka terlebih lagi dalam kehidupan keluarga. Prinsip tauhid mengantarkan setiap anggota keluarga untuk menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Tauhid menjamin rasa keadilan pada semua anggota masyarakat.

Tauhid membuat suami isteri memiliki komitmen yang kuat dalam perkawinan, dan menajdikan mereka mitra sejajar yang kokoh dengan

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ *Ibid.*

meyakini posisi mereka yang setara dan sederajat sebagai manusia. Mereka saling mengasihi, menyayangi, dan mencintai dalam suka serta duka, berbagi ilmu dan pengalaman. Kehidupan keduanya akan selalu diliputi rasa syukur ketika mendapat rahmat. Sebaliknya, mereka berdua akan penuh tawakal kalau diberi cobaan. Sebab, keduanya begitu yakin bahwa hanya Allah *swt.*, semata tempat bergantung dan tempat kembali kelak di hari nanti.²⁰¹

Prinsip tauhid selalu membawa keduanya melafalkan zikir *La> hawla wa la> quwwata illa> bi Allah* (tiada daya dan upaya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah). Keduanya secara kompak dan gembira merawat dan membesarkan anak-anak mereka dalam kehangatan dan kasih sayang. Demikian pula, bersama-sama membantu setiap anggota keluarga yang memerlukan bantuan, terutama mereka yang lemah dan sudah uzur, khususnya para orangtua mereka.²⁰²

Dengan prinsip tauhid yang mereka yakini, keduanya akan lebih mudah membangun keluarga yang tetram (*sakinah*), penuh dengan cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Hal ini berdampak positif bukan hanya bagi internal anggota keluarga mereka, melainkan juga kepada keluarga lain dan sekitar mereka.

Kehidupan keluarga berbasis tauhid yang sarat dengan semangat persamaan dan persaudaraan ini pada akhirnya mendorong semua anggota masyarakat, tanpa ada pembedaan sedikit pun, untuk bersama-sama bahu-membahu menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dalam rido Allah (*baldatun t{ayyibatun wa rabbun ghafu>r*).²⁰³

²⁰¹ *Ibid.*, h. 34.

²⁰² *Ibid.*

²⁰³ *Ibid.*, h.35.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdurrahman, Jalaluddin. *al-Mas{alih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'*, Mesir: Matba'ah as-Sa'adah, 1403.
- Adhim, M. Fauzil dan M. Nazif Masykur, *Di Ambang Pernikahan*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. *al-Mas{lahah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 (01), 2018, tersedia di: <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140> (12 Mei 2019)
- Akbar, Muhammad. *Perbandingan Hidup Secara Islam Dengan Tradisi di Pulau Jawa*, Cet. 1, Bandung: Al Ma'arif, 1980
- Alauddin, Imam. *Badai'u S{ana'i*, Beirut: Da>r al-Kutub, 1997
- al-Fiqhiyyah wa Tatbiqotiha fil maz{ahib al-Arba'ah, Juz 1.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- AS, Susiadi. *Buku Daras, Us{ul al-Fiqh I*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2010
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013
- Asqalani, al, al-Ha>fiz Ibn Hajar. *Bulugh al-Mara>m*, Mekah: Da>r al-Ulu>m, 1478H
- Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 4 Desember 2015, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/210/358> (16 Juni 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- Bani, al, Imam. *al-Silsilah al-Dho'ifah wa al-Maudu'ah*, Jilid 2, t.t.
- Barnu, Muhammad Siddiqy Ali. *al-Wajiz fi lydohii Qowa'id al- Fiqh al- Kulliyah*, Juz 1.
- Bukhari, al, al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shohih Bukhori*, Beirut: Da>r Ibn Kat{ir, 256 H.
- Chairul Umam, *Us{ul al-Fiqh I*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Data Demografi Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan

Data Geografis Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan

Data Monografi Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Jawa Timur: Kantor Wilayah Kementerian Agama, 2010.

Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010

Gamrawi, al.*al-Sirad al-Wahhaj*, Libanon: Da>r al-Ma'rifah, t.t.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006

Gustiawati, Syarifah& Novia Lestari. "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga", *Jurnal Mizan*, Vol. 4 No. 1, 2016, Bogor: FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, 2016.

Hafiz, al, Ahsin W. *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2012

Hermanto, Agus. "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali)", *Jurnal al-'Adalah*, Vol. 14, No. 2, 2017, h. 446, diakses tanggal 18 Agustus 2021, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Humaidi, "Pergeseran Makna Kafa'ah Dalam Pernikahan (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa'ah Dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama Dan Aktifis Kesetaraan Gender Di Kota Malang)", (Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011).

Husaini, al, Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayah Al-Akhyar*, T.k: t.p, t.t

IAIN Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi*, diterbitkan oleh Program Pascasarjana (PPs), Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2012

Ihromi, T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor, 2004

Indonesia, Universitas Islam. *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid VI, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

- Irawan, Ibnu, Jayusman, dan Agus Hermanto. "Studi Fatwa al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus al-Ilyah Wa al-Ifta': Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan al-Qur'an", *Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 13, No. 02 Tahun 2019, (Bandar Lampung: Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2019).
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah, 2014
- Jauziyyah, al, Ibnu Qayyim. *Zadul Ma'ad*, Jilid V, Beirut: Dar al-Fikr, 1995
- Jaziri, al, Abdurrahman. *al-Fiqhu 'Ala Madhahibi al-Arba'ah*, Juz 4, Kairo: Da'arul Hadis al-Qahira, t.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cetakan Pertama, Jakarta: Amzah, 2005
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah)*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2009
- Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Mubin, (*al-Qur'an dan Terjemahannya*), Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013
- Khallaf, Abdul Wahab. *Masdar al-Tasyri' al-Islami Fi al-Ma' La' Nassa Fih*, Cet. III, Kuwait: Da'ir al-Qalam, 1972
- Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Usul al-Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansani, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kitab Sunan al-Da'ir al-Qutbi, Juz 3
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019
- Kompilasi Hukum Islam
- Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Aditya Bhakti, 1990
- Latif, Nasaruddin. *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Cet. II, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Mahalli, al, Imam Jalaluddindan Imam Jalaluddin as-Suyuti. *Tafsir Jalalain I*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010
- Majah, Sunan Ibnu. No.1968, *Mustadrok Lil-hakim*, No.2687, Sunan Da'ir al-Qutbi, No.3788 dan Sunan Kubro Lil-Baihaqi, No.13758
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan ke-10, Edisi 1, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

- Mas'ud, Ibnu. *Fiqih Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Masykuroh, Yufi Wiyos Rini. *BP4 Kepenghuluan*, Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Miftah, Ahmad Harisul. "Kafa'ah Dan Perubahan Sosial," *Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 17, No. 01 (13 Juni 2018): 8.
- Mohammad Rusfi, *Validitas Mas{lahah al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, Al-Adalah Vol. XII, No. 1 (Juni 2014), dapat di akses di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175>, (07 April 2019, 11.44 WIB)
- Moloeng, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013
- Muhammad, Jamaluddin. Juz II
- Muhd{or, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, UU No 1/1974 (UU Perkawinan), UU No 7/1989 (UU Peradilan Agama, dan KHI*, Cet. II, Bandung: al-Bayan, 1995.
- Mulia, Siti Musda. *Membangun Surga di Bumi (Kiat-kiat Membangun Kluarga Ideal dalam Islam)*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2011.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, t.t
- Musa, Muhammad Yusuf. *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi alIsla*, Mesir: Da>r al-Kutub al Arabi, 1376H/1956
- Musa, Muhammad Yusuf. *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi al-Islam*, Mesir: Da>r al-Kutub al-Arabi, 1376H/1956M
- Muslim, Imam. *S{ohih Muslim*, Pustaka al-Sunnah, No.1480
- Nasution, Ahmad Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia, 2005),
- Nur, Happy. "Kafaah Dalam Pernikahan dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisiyyah Kota Malang)", *Journal Of Family Studies*, Vol. 3 No.3. April 2019.
- Nur, Iffatin. *Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) dalam al-Qur'an dan Hadis*

Nurchaya, "Kafa'ah Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Undang-Undang Negara Muslim", *Jurnal al-Muqaranah Program Studi Perbandingan Mazhab*, Vol. 5 No.1 Februari 2017.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan
<https://www.waykanankab.go.id/pages/sejarah> (diakses pada tanggal 20 Februari 2021)

Ramli, al. *Nihayah al-Muhtaj*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halab, 1967

Rizal, Faisol. "Implementasi Kafa'ah Dalam Keluarga Pesantren "(Studi Penerapan Kafa'ah Kiai Pesantren Kab. Jombang", Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011

Romlah, *Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil*, *Jurnal Al-A'dalah* Vol. XIII, (1 Juni 2016)

Romli, Dewani. *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009.

Rusfi, Muhammad. *Usjul al-Fiqih-I*, Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017

Rusfi, Muhammad. *Usjul al-Fiqih-I*, Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT al-Maa'rif, 1981.

Salam, Lubis. *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Surabaya: Terbit Terang, 2003

Sayuti, Ajmah. "Al-Kafa'ah Fi Alnikah," *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 5, No. 2 (18 November 2015)

Shan'iny, al, *Subul al-Salam*, Juz 3, Kairo: Da>r Ihya' al-Turat{ al-Araby, 1379 H/ 1980 M.

Shihab, M. Quraish. *Perempuan*, Tangerang: Lentera Hati, 2010

----- . *Wawasan al-Qur'an* , Bandung: Mizan, 1999.

----- . *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cetakan Ke-6, Bandung: Mizan, 1997

Simanjuntak, Bugaran Antonius. *Harmonius Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo)
- Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *Jurnal Asas*, Vol. 7 No. 1, Januari 2015, Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Suyuti, al. *Sunan al-Nasa’i, Kitab al-Kafa’ah*, Hadis No. 3225. Beirut: Da’r al-Ma’ifah, 1991. Hadis ini diriwayatkan oleh ibn Hibban dan al-Hakim.
- Syafi’i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. III, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syamsuddin, Syekh Ahmad. *Kitab Sunan Ibn Majah*, Libanon: Da’r al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Usjul al-Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009
- Syarifuddin, Amir. *Usjul al-Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009
- Syaukani, al. *Nail al-Autar, Kitab al-Kafa’ah*, IV, h. 138. Hadis Riwayat Samurah dengan sanad sahih
- Taufik, Otong Husni. “Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 8 No. 1 Desember 2017.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013
- Umam, Chaerul. *Usjul al-Fiqih I*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Utsman, Abu Bakr. *I’annah al-Tholibin*, Beirut: Da’r al-Kutub, 1995.
- Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawaid Fiqhiyyah*, terjemah Wahyu Setiawan, Cet. ke-2, Jakarta: Amzah, 2009
- Yudowibowo, Syafrudin. “Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa’ah Dalam Hukum Perkawinan Islam”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 1 No. 2 Mei-Agustus 2012, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2012.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran al-Qur’an, 1973
- Zahrah, Muhammad Abu. *Aqd al-Zawaj wa Asaruh*.

Zuhaily, al, Qod{ i Abdul Wahab al-Maliki. al-Israf 'ala Masail al-Khalaf, Tunisia: Matba'ah al-Iradah, t.t.

Wawancara

Ade wawancara dengan penulis, kediamannya di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan, 23 Desember 2020

Ahmad dengan penulis, kediaman Bapak Ahmad di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan, 20 Desember 2020

Aris, wawancara dengan penulis, kediaman aris di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan, 23 Desember 2020

Durip, wawancara dengan penulis, kediamannya di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan, 24 Desember 2020

Endika, wawancara dengan penulis, kediaman Ibu Endika di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan, 20 Desember 2020

Erika, wawancara dengan penulis, kediaman Ibu Erika di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan, 22 Desember 2020

Hasanuddin dengan penulis, kediaman Bapak Hasanuddin di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan, 23 Desember 2020

Ihsanuddin, wawancara dengan penulis, kediaman Bapak Ihsanuddin di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan, 20 Desember 2020

Ika Melani, wawancara dengan penulis, kediamannya di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan, 24 Desember 2020

Kamsiah, wawancara dengan penulis, kediaman kamsiah di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan, 23 Desember 2020

Kangsah, wawancara dengan penulis, kediaman kangsah di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan, 23 Desember 2020

Mutiah, wawancara dengan penulis, kediaman Ibu Mutiah di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan, 21 Desember 2020

Mutmainnah, wawancara dengan penulis, kediamannya di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan, 21 Desember 2020

Nursamah, wawancara dengan penulis, kediaman Nursamah di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan, 23 Desember 2020

Rosmila, wawancara dengan penulis, kediaman Ibu Rosmila di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan, 21 Desember 2020

Saipuddin, wawancara dengan penulis, kediaman Bapak Saipuddin di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan, 20 Desember 2020.

Sari, wawancara dengan penulis, kediaman Ibu Sari di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan, 21 Desember 2020

Yunus, wawancara dengan penulis, kediaman Yunus di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan, 23 Desember 2020

